



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.990, 2018

KEMENPP-PA. Indikator Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP dan PA.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender yang mendasari pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa indikator evaluasi pengarusutamaan gender yang ada sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan indikator pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender yaitu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 3

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender memuat:

- a. formulir; dan
- b. penjelasan pengisian formulir.

Pasal 4

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender terdiri atas:

- a. indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
- b. indikator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pasal 5

- (1) Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah diisi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan (*reward*) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang telah berhasil melaksanakan Pengarusutamaan Gender secara berkala.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L)

PENJELASAN TENTANG PENGISIAN FORMULIR

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk melihat status Kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Informasi yang dikumpulkan akan dapat digunakan untuk penilaian kinerja, merencanakan peningkatan pelaksanaan PUG, menghitung kebutuhan sumber daya, sebagai informasi dasar untuk pengembangan program yang lebih luas dan keperluan lainnya. Karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, maka kebenaran informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan benar, agar pemanfaatannya menjadi maksimal dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan dan hasilnya.

I. KETENTUAN UMUM

Pengisian formulir ini melibatkan seluruh Unit Eselon 1 dan Unit Kerja di lingkungan K/L.

Sebelum formulir pemantauan dan evaluasi ini diisi ada beberapa dokumen yang perlu disediakan yaitu:

1. Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG dan PPRG, termasuk Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang telah dikeluarkan oleh K/L;
2. Semua kebijakan dalam bentuk Pedoman, Juklak, Juknis, dll terkait dengan PUG dan PPRG yang telah dikeluarkan oleh K/L; dan
3. Dokumen perencanaan dan penganggaran berupa Renstra, Renja, RKA dan DIPA K/L.

Pada umumnya jawaban dari pertanyaan adalah memilih salah satu pilihan jawaban. Jika pada jawaban yang dipilih diminta untuk memberikan penjelasan, mohon agar dituliskan jawabannya. Untuk Jawaban yang pilihannya dapat lebih dari 1 jawaban, akan diberi keterangan pada pertanyaan tersebut.

II. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Formulir Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG ini di bagi ke dalam dua bagian besar yaitu:

1. Bagian A khusus berkaitan dengan indikator Kelembagaan PUG dari 7 prasyarat awal PUG; dan
2. Bagian B khusus berkaitan dengan hasil pelaksanaan PUG.

Penjelasan yang akan diuraikan di bawah ini adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau memungkinkan untuk salah tafsir, sedangkan pertanyaan yang mudah tidak akan diuraikan.

A. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG, 7 Pra-syarat awal PUG

1. KOMITMEN

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “kebijakan” disini adalah aturan tertulis yang bersifat mengatur (*regelling*) dan mengikat yang dikeluarkan oleh K/L berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di K/L Saudara

seperti Peraturan Menteri (Permen)/Peraturan Kepala lembaga (Perka), atau lainnya.

Pertanyaan Nomor 2 – 3 jelas

Pertanyaan Nomor 4

Yang dimaksud kebijakan teknis operasional adalah aturan teknis sebagai upaya tindak lanjut dari kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan nomor 1 diatas yang dikeluarkan oleh K/L.

Pertanyaan Nomor 5 – 7 jelas

Pertanyaan Nomor 8

Yang dimaksud dengan Rencana Pencapaian PUG adalah rencana kegiatan untuk pencapaian PUG di K/L selama minimal 3 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh K/L. Di K/L namanya dapat berbeda-beda, maka didalam pertanyaan nomor 8 ini diberikan pilihan yang paling cocok dengan yang dimiliki K/L, kalau tidak ada yang tepat silakan dituliskan dalam kolom jawaban lain-lain.

2. KEBIJAKAN

Dokumen Perencanaan

Pertanyaan Nomor 9

Dalam dokumen Renstra K/L dikatakan responsif gender manakala memuat: 1. Dasar hukum PUG, 2. Data terpilah, 3. adanya isu-isu gender dan anak, 4. visi dan misinya baik tersurat maupun tersirat, 5. program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, dan 6. indikator gender, saudara diberikan pilihan untuk mengisi yang memang ada dalam Renstra K/L Saudara.

Pertanyaan Nomor 10

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat berapa banyak Renstra Unit Kerja Eselon I yang menurut pertimbangan Saudara sudah responsif gender (dinilai dengan menggunakan 6 kriteria seperti pada pertanyaan nomor 9)

Dokumen Anggaran

Pertanyaan Nomor 11 jelas.

3. KELEMBAGAAN PUG

Pertanyaan Nomor 12

Yang dimaksud unit kerja yang menangani PUG adalah unit Eselon II di bawah Sekretariat Jendral atau Sekretariat Kementerian/Lembaga yang menangani langsung pelaksanaan PUG. Penunjukannya dapat di tingkat Eselon III atau Eselon IV.

Pertanyaan Nomor 13-16 jelas

4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber Daya Manusia

Pertanyaan Nomor 17

Yang dimaksud dengan perencana yang terlatih di Unit Kerja Eselon I adalah perencana yang telah mengikuti pelatihan PPRG baik yang mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA atau K/L sendiri dan yang belum/tidak mendapatkan sertifikat.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud auditor terlatih disini adalah auditor dan Inspektur di Inspektorat K/L yang telah mengikuti pelatihan PPRG dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA atau K/L.

Pertanyaan Nomor 19

Yang dimaksud fasilitator disini adalah Fasilitator yang biasanya didayagunakan K/L baik berasal dari K/L sendiri, Perguruan Tinggi/Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G), maupun dari Lembaga Masyarakat, dan telah mempunyai sertifikat pelatihan TOT/Fasilitator PPRG yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA dan K/L.

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud "*Gender Champion*" disini adalah seseorang apakah dia itu pejabat di internal K/L atau orang lain, Aktivistis Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi/Pusat Studi Wanita/Gender yang selalu memberikan perhatian pada perkembangan dan kemajuan PUG di K/L.

Anggaran K/L

Pertanyaan Nomor 21

Yang dimaksud alokasi anggaran untuk fasilitasi PPRG adalah jumlah dana yang ada pada lembaga/unit kerja *Focal Point* K/L, *Focal Point* Satker, dan Inspektorat yang digunakan untuk kegiatan mendorong PUG di K/L, contoh: Biro Perencanaan mempunyai kegiatan untuk *Capacity Building* tentang PPRG, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG, dstnya.

Pertanyaan Nomor 22 jelas

5. DATA TERPILAH, SISTIM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI

Data Terpilah dan sistim informasi

Pertanyaan Nomor 23

Yang dimaksud dengan pengelola data gender adalah mereka yang sudah dilatih untuk membuat dan mengelola data gender di Unit Kerjanya.

Pertanyaan no 24-25 jelas

Pertanyaan Nomor 26

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 26 adalah dimana data terpilah tersebut sudah di SK kan dan masuk dalam sistem data K/L.

Pertanyaan Nomor 27 cukup jelas

Pertanyaan Nomor 28

Yang dimaksud dengan bahan KIE dalam promosi PUG bisa dalam bentuk buku laporan pelaksanaan PUG di K/L yang diterbitkan oleh K/L, atau mungkin buku-buku seperti “Buku Saku PPRG”, Panduan Teknis Analisis Gender GAP dan lain-lain seperti tercantum dalam kolom jawaban pertanyaan nomor 27.

6. METODE DAN TOOL

Pertanyaan Nomor 29-32 jelas.

7. PERANSERTA MASYARAKAT

Pertanyaan Nomor 33-35 jelas

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PUG

1. Kebijakan, program dan kegiatan

Kebijakan

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan kebijakan responsif gender adalah peraturan per-undang-undangan yang diinisiasi dan atau dikeluarkan Pemerintah atau K/L yang berkaitan dengan usaha penyelesaian isu-isu gender dan anak terkait dengan tugas dan fungsi K/L itu selain kebijakan PUG. Kebijakan itu bisa dalam bentuk Undang-Undang, Permen/Perka lembaga, atau mungkin Peraturan Sekjen atau Sestama.

Pertanyaan Nomor 2-3 cukup jelas

Program dan kegiatan

Pertanyaan Nomor 4

Yang dimaksud oleh pertanyaan ini adalah program-program yang langsung atau tidak langsung mampu menyelesaikan atau memperkecil kesenjangan gender dan isu anak sesuai tugas fungsi

K/L. Contoh program bantuan beasiswa berprestasi, kegiatan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafiking dan lain-lain tetapi belum atau tidak dilakukan dengan prosedur penyusunan ARG.

Pertanyaan Nomor 5

Yang dimaksud dengan kegiatan responsif gender disini adalah kegiatan yang disusun melalui proses PPRG dan ARG. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam poin a tersebut masing-masing dilampiri GBS nya.

Pertanyaan Nomor 6

Yang dimaksud program/kegiatan inovasi adalah program-program atau kegiatan-kegiatan terobosan yang memang atau khusus dibuat untuk mempercepat penyelesaian masalah kesenjangan gender dan anak sesuai tupoksi K/L itu contoh, Program Peningkatan Usaha Ekonomi bagi perempuan pedesaan, dan lain-lain.

2. KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud oleh pertanyaan nomor 7 ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda) atau K/L lain di luar K/L Saudara, yang telah atau sedang melakukan kunjungan studi banding, ikut pelatihan PPRG, dan lain-lain dengan maksud untuk belajar dan berbagi pengalaman tentang kegiatan PPRG di K/L saudara.

Pertanyaan Nomor 8, jelas.

Anggaran

Pertanyaan Nomor 9

Yang dimaksud pertanyaan nomor 9 ini adalah anggaran yang ada pada K/L yang langsung ataupun tidak langsung mampu menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender dan atau anak di K/L saudara. Anggaran ini bisa bersifat anggaran untuk kebutuhan spesifik perempuan atau laki-laki, anggaran untuk

capacity building, dan anggaran kesetaraan gender. Mungkin sebagian sudah dilakukan melalui proses GAP dan GBS, namun sebagian besar belum, silakan untuk disebutkan dalam kolom jawaban.

Pertanyaan no 10 cukup jelas

Peranserta masyarakat dan jejaring

Pertanyaan Nomor 11

Yang dimaksud kajian dalam pertanyaan nomor 11 ini adalah kajian tentang atau berkaitan dengan isu gender dan atau anak di bidang pembangunan K/L baik yang dilakukan PSW/LM atau pun dunia usaha sendiri atau mungkin dalam rangka kerjasama Pemda dengan PSW/LM/Dunia usaha.

Pertanyaan Nomor 12 cukup jelas

Pertanyaan Nomor 13

Yang dimaksud pertanyaan Nomor 13 adalah kegiatan pelatihan/advokasi PPRG atau pelatihan yang berkaitan gender dan anak yang dilaksanakan oleh PSW/LM dan dunia usaha.

Pertanyaan Nomor 14

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 14 adalah keterlibatan PSW/LM dan dunia usaha dalam berbagai program dan kegiatan responsif gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya.

**FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L)**

IDENTITAS KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA

1. Nama K/L	:	
2. Nama Unit Organisasi yang menangani PUG	:	
3. Nama Pimpinan/Kepala Unit Organisasi	:	
4. Alamat Unit Organisasi	:	
5. Telepon/Fax/E-mail	:	
6. Nama dan telepon kontak person	:	

A. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG DI K/L

PERTANYAAN		JAWABAN
1. Komitmen		
Kebijakan K/L tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)		
1	Apakah K/L Saudara memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender?	<p>a. Ya. Kebijakan itu adalah:</p> <p>1. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, Nomor: (lampirkan salinannya)</p> <p>2. Surat Keputusan Sekretaris Jendral/Sekretaris Menteri atau Sekretaris Utama Lembaga. Nomor: (Lampirkan salinannya)</p> <p>3. Keputusan lainnya, Nomor : (Lampirkan salinannya)</p> <p>b. Belum mempunyai. Mengapa? Jelaskan</p>
2	Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan No. 2 diatas sudah di sosialisasikan/ diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	<p>a. Sudah, kepada:</p> <p>1. Para Eselon 1 dan 2;</p> <p>2. Para eselon 3 dan 4.</p> <p>3. Para Perencana di Satker</p> <p>4. Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi/Pusat Studi/Pusat Studi Wanita/Gender dan dunia usaha/swasta</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
3	Bagaimana peraturan tersebut	a. Khusus Untuk Lingkungan K/L melalui Surat Edaran Dari

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>disosialisasikan/diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>(Nama Jabatan) (Lampirkan)</p> <p>b. Melalui Media Massa, yaitu: (Lampirkan salinannya)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>c. Melalui Forum: (lampirkan dokumen pendukung)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>d. Seminar/workshop: (Lampirkan dokumen pendukung)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>c. Lainnya. Sebutkan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>Kebijakan pelaksanaan PUG dari Menteri/Kepala Lembaga</p> <p>4 Apa di K/L saudara sudah ada kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Permen/Perka lembaga tentang PUG di K/L?</p>	<p>a. SK Menteri/Ka lembaga Nomor : Tahun tentang</p> <p>b. SE Menteri/Kalembaga Nomor : Tahun tentang</p> <p>c. SE Sekjen/Sesmen/Sestama K/L Nomor : Tahun tentang</p> <p>d. Lainnya. Sebutkan</p> <p>e. Tidak/belum ada. Mengapa? Jelaskan</p>
<p>5 Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam poin 4 diatas sudah disosialisasikan/diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Sudah, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Eselon 1 dan 2 2. Para Eselon 3 dan 4 3. Para perencana Satker 4. LM, PSW/G dan dunia usaha 5. OPD terkait di daerah <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>6</p> <p>Jika sudah, sebagaimana jawaban pertanyaan 5 diatas, melalui kegiatan apa? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>.....</p> <p>a. Advokasi dan sosialisasi/advokasi</p> <p>b. Pelatihan PPRG</p> <p>c. Bimbingan teknis;</p> <p>d. Kegiatan lainnya. Sebutkan</p>
<p>7</p> <p>Berapa jumlah Unit Kerja Eselon II yang telah mendapat sosialisasi/advokasi tentang kebijakan teknis operasional PPRG di K/L</p>	<p>a. Unit Kerja Eselon II</p> <p>b.% dari semua Unit Kerja Eselon II</p>
<p>Rencana pencapaian PUG di masing- masing Satker</p>	
<p>8</p> <p>Apakah ada rencana pencapaian PUG K/L yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekjen/Sesmen/Sesbadan atau Ka Biro Perencanaan? Apa nama rencana tersebut?</p>	<p>a. Ada, yaitu</p> <p>1. Rencana Aksi PUG K/L;</p> <p>2. Rencana Kerja POKJA PUG K/L;</p> <p>3. Roadmap/Peta jalan PUG K/L;</p> <p>4. Lain-lain Sebutkan</p> <p>b. Belum ada. Mengapa?</p>

PERTANYAAN		JAWABAN	
		Jelaskan	
2. KEBIJAKAN			
Dokumen perencanaan			
9	Apakah Renstra K/Lsudah mengakomodasikan kesetaraan gender dalam aspek-aspek di kolom jawaban? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	a. Menggunakan Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan (sebutkan) b. Menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (di bagian mana?) c. Memasukkan Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas K/L (jelaskan) d. Memasukkan ke dalam Program dan kegiatan (sebutkan) e. Indikator gender masuk dalam Indikator keberhasilan (jelaskan)	

PERTANYAAN		JAWABAN	
		
10	Berapa jumlah Renstra Unit Kerja Eselon 1 yang menurut penilaian Saudara sudah responsif gender (dimilai dengan menggunakan 6 kriteria seperti pada pertanyaan nomor 9)	f. Kesenjangan gender belum masuk dalam Renstra a.Unit Kerja Eselon I b.% dari semua Renstra Eselon I c. Belum ada. Jelaskan mengapa belum ada	
Dokumen Anggaran (RKA K/L, ARG, GBS)			
11	Apakah dalam bilateral dan trilateral meeting untuk tahun berjalan ada kegiatan yang “ ditagging ” sebagai kegiatan yang responsif gender? Masukkan semua kegiatan yang (ditagging)	a. Ada, yaitu: (Lampirkan GBSnya) 1. Kegiatan 2. Kegiatan 3. Kegiatan 4. Kegiatan 5. Kegiatan 6. Kegiatan 7. Kegiatan 8. Kegiatan	

PERTANYAAN		JAWABAN	
	
		9. Kegiatan
		10. Kegiatan
		11. Kegiatan
		b. Belum ada, mengapa? (Jelaskan)
	
3. KELEMBAGAAN			
12	Sebutkan nama Unit Kerja yang menangani PUG di K/L?	a. Eselon I nya (Sebutkan nama Unit Kerja)
		b. Eselon II nya , (Sebutkan nama Unit Kerja)
		c. Eselon III, (Sebutkan nama Unit Kerja)
		d. Unit lainnya. Sebutkan
		e. Tidak mempunyai unit kerja yang menangani PUG	
		a. Ada. Ditetapkan dengan	
13	Apakah ada Kelompok Kerja PUG di K/L? Jika ada, ditetapkan dengan keputusan apa?	1. Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga : No. Tahun	tentang
		2. Keputusan Sekjen/Sesmen/Sestama	: No.....Tahun.....
		3. Keputusan lainnya, Sebutkan
		b. Belum ada Pokja PUG. Mengapa? (Jelaskan)
	

JAWABAN	
PERTANYAAN	
14	<p>Jika ada POKJA PUG, apakah keanggotaan POKJA PUG sudah mewakili seluruh Biro, Direktorat, Pusat di Unit Kerja Eselon I dan Inspektorat yang ada di K/L? (bila jawaban pertanyaan no 13: Ada)</p> <p>15</p> <p>Apakah Unit Kerja Eselon I di K/L sudah mempunyai focal point?</p>
16	<p>Apakah K/L sudah mempunyai Rencana Aksi pelaksanaan PUG?</p>
	<p>.....</p> <p>a. Sudah mewakili seluruh Biro, Direktorat di Unit Kerja Eselon I dan Inspektorat.</p> <p>b. Terwakili sebagian yaitu (jumlah)..... Unit Eselon II di maksud</p> <p>a. Sudah</p> <p>1. Jumlahnya Unit Eselon I (Lampirkan Surat keputusannya)</p> <p>2. % dari semua Unit Kerja Eselon I</p> <p>b. Belum ada satupun. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>a. Sudah</p> <p>1. Ditetapkan dengan SK Menteri/Kepala Lembaga (Lampirkan)</p> <p>2. Dengan SK SekJen/Sesmen/Sestama (Lampirkan)</p> <p>b. Belum ada. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

PERTANYAAN		JAWABAN
4. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN		
Sumberdaya Manusia		
17	Apakah Unit Kerja Eselon I sudah mempunyai perencanaan yang terlatih untuk melaksanakan PPRG di masing-masing Unit Eselon II di bawahnya?	<p>a. Sudah</p> <p>1. Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mempunyai perencanaan yang terlatih dan telah mempunyai sertifikat pelatihan PPRG Satker</p> <p>2. Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mempunyai perencanaan yang terlatih tetapi belum mempunyai sertifikatSatker</p> <p>3. Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mempunyai perencanaan yang terlatih(no.1+no.2)</p> <p>4.% dari semua Unit Kerja Eselon II (no. 3 dibagi jumlah semua)</p> <p>b. Belum ada Unit Kerja yang memiliki perencanaan yang terlatih. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
18	Apakah Inspektoralat sudah mempunyai Inspektur dan atau auditor yang sudah dilatih PPRG?	<p>a. Sudah</p> <p>1. Inspektur orang</p> <p>2. Auditor orang</p> <p>b. Belum ada. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

PERTANYAAN		JAWABAN
19	Apakah K/L mempunyai fasilitator untuk pelatihan dan pendampingan PPRG ?	<p>a. Ya, mempunyai fasilitator</p> <p>1. Yang berasal dari K/L sendiri..... Orang</p> <p>2. Yang berasal dari Perguruan Tinggi Orang</p> <p>3. Yang berasal dari Lembaga Masyarakat orang</p> <p>4.</p> <p>5. Jumlah seluruh fasilitator yang dimilikiorang</p> <p>6.% dari seluruh unit kerja Eselon II</p> <p>b. Belum mempunyai. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
20	Apakah ada Gender Champion di K/L atau senantiasanya memberikan masukan untuk K/L?	<p>a.Orang</p> <p>b. Tidak ada (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Anggaran untuk kelembagaan PUG		
21	Apakah K/L mempunyai alokasi anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan PUG?	<p>a. Ya, mempunyai</p> <p>1. Di <i>Focal Point</i> PUG K/L Jumlahnya Rp..... Atau% terhadap anggaran Fokal Poin PUG K/L</p> <p>2. Di <i>Focal Point</i> PUG Unit Kerja Eselon I selain Inspektur Jendral atau Inspektur Utama Rp. atau% terhadap anggaran Sekretariat Satker</p> <p>3. Di Inspektorat Rp..... atau% dari anggaran</p>

PERTANYAAN		JAWABAN	
		Inspektorat K/L	
		b. Tidak mempunyai alokasi anggaran (Jelaskan)
22	Apakah ada anggaran dari luar K/L untuk fasilitas PUG misalnya dari bantuan Luar Negeri, atau Lembaga Masyarakat. (Jawaban bisa lebih dari 1 jawaban)	a. Ada
		1. Dari (sebutkan lembaganya) Jumlahnya Rp
		2. Dari (sebutkan lembaga nya) Jumlahnya.Rp
		3. Dari (sebutkan lembaganya) Jumlahnya.Rp
		b. Tidak ada.
5. DATA, SISTIM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI UNTUK PROMOSI PUG			
23	Apakah ada Unit Kerja Eselon II yang mempunyai pengelola data gender yang sudah dilatih?	a. Ada.
		1. Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mempunyai tenaga pengelola data yang sudah dilatih orang
		2.% dari semua Unit Kerja Eselon II di K/L
		b. Belum ada. Mengapa? (Jelaskan)
24	Apakah Statistik/ Profil gender K/L sudah ada?	a. Sudah, namanya? (sebutkan)
		

PERTANYAAN		JAWABAN	
		b. Belum, mengapa? (Jelaskan)	
25	Apakah sudah ada Unit Kerja Eselon II yang telah mempunyai Data terpilah ?	a. Sudah 1. Jumlahnya Satker 2.% dari semua Satker b. belum ada. Mengapa? (Jelaskan)	
26	Apakah data terpilah sudah menjadi bagian dari sistem data K/L?	a. Sudah, ditetapkan dengan Surat Keputusan b. Sudah, tetapi belum ditetapkan dengan SK c. Belum menjadi bagian dari system data (Jelaskan)	
27	Apakah data dan statistik gender sudah dapat diakses melalui Website K/L?	a. Sudah, pada bagian dari website b. Belum. Mengapa? (Jelaskan)	

PERTANYAAN		JAWABAN
28	Dalam rangka promosi berkaitan dengan PUG/PPRG, apakah K/L mempunyai jenis/ bahan informasi?	<p>a. Ya. Mempunyai. Dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan; 2. Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di K/L; 3. Bahan KIE utk promosi PUG berupa Banner, leaflet dan brosur; 4. Media massa elektronik; 5. Media massa cetak; dan 6. Media sosial <p>b. Tidak mempunyai</p>
6. METODE DAN TOOL		
29	Apakah K/L menerbitkan Pedoman Teknis pelaksanaan PUG ?	<p>a. Ya, judulnya</p> <p>b. Belum. Mengapa? (Jelaskan)</p>
30	Apakah K/L menerbitkan Modul Pelatihan PUG/PPRG ?	<p>a. Ya, judulnya</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Belum. Mengapa (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>31 Metode analisis gender apa yang digunakan atau diperkenalkan di K/L?</p>	<p>a. <i>Gender Analysis Pathway</i>;</p> <p>b. PROBA (<i>Problem-based Analysis</i>);</p> <p>c. SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>); dan</p> <p>d. Lainnya, Sebutkan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>e. Belum ada (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>32 Apakah K/L telah menerbitkan Pedoman Audit yang responsif gender?</p>	<p>c. Ya, judulnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>d. Belum. Mengapa (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7. PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	
<p>33 Apakah Lembaga Masyarakat (LM), Perguruan Tinggi (PT) dan Dunia Usaha (DU) termasuk dalam Pokja PUG?</p>	<p>a. Ya. Mereka terdiri dari:</p> <p>b. LM, (Sebutkan)</p> <p>1. LM</p> <p>.....</p> <p>2. LM</p> <p>.....</p> <p>3. LM</p> <p>.....</p> <p>4. LM</p> <p>.....</p> <p>5. LM</p> <p>.....</p> <p>c. Perguruan Tinggi/Akademisi, (sebutkan):</p> <p>1. PT/Akademisi</p> <p>.....</p> <p>2. PT/Akademisi</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>.....</p> <p>3. PT/Akademisi</p> <p>4. PT/Akademisi</p> <p>5. PT/Akademisi</p> <p>d. Perusahaan/Dunia Usaha, (sebutkan)</p> <p>1. Dunia Usaha</p> <p>2. Dunia Usaha</p> <p>3. Dunia Usaha</p> <p>4. Dunia Usaha</p> <p>5. Dunia Usaha</p> <p>e. Tidak atau belum terlibat dalam Pokja PUG</p>
<p>34 Kegiatan apa yang melibatkan Lembaga Masyarakat, PT, dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender dan anak;</p> <p>b. Perumusan kebijakan;</p> <p>c. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan;</p> <p>d. Pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;</p> <p>f. Layanan masyarakat; dan</p> <p>g. Lainnya, Sebutkan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>35 Berapa jumlah dan nama dari LM, PT dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan kegiatan yang responsif gender?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>h. Belum terlibat</p> <p>a. Lembaga Masyarakat, Jumlah yang terlibat....., yaitu:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>b. Perguruan Tinggi, Akademisi, Jumlah yang terlibat....., yaitu:</p> <p>1.</p> <p>.....</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	c. Perusahaan/Dunia Usaha, Jumlah yang terlibat
	yaitu:
	1.
	2.
	3.
	4.

PERTANYAAN	JAWABAN
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PUG DI K/L

PERTANYAAN		JAWABAN
1. Kebijakan, Program Dan Kegiatan		
Kebijakan		
1	Apakah ada Kebijakan K/L atau Kebijakan Bidang Pembangunan K/L yang responsif gender yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir?	<p>a. Ada, yaitu (Lampirkan Undang-Undang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 2. Undang-Undang 3. Undang-Undang 4. Undang-Undang 5. Undang-Undang <p>Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri/Kepala : 2. Peraturan Menteri/Kepala : 3. Peraturan Menteri/Kepala : 4. Peraturan Menteri/Kepala : 5. Peraturan Menteri/Kepala : 6. Peraturan Menteri/Kepala : 7. Peraturan Menteri/Kepala : 8. Peraturan Menteri/Kepala :

PERTANYAAN	JAWABAN
	9. Peraturan Menteri/Kepala :..... 10. Peraturan Menteri/Kepala :..... 11. Peraturan Menteri/Kepala :..... 12. Peraturan Menteri/Kepala :.....
	Peraturan Dirjen/Deputi (Lampirkan), yaitu: 1. Peraturan Dirjen/Deputi 2. Peraturan Dirjen/Deputi 3. Peraturan Dirjen/Deputi 4. Peraturan Dirjen/Deputi 5. Peraturan Dirjen/Deputi 6. Peraturan Dirjen/Deputi 7. Peraturan Dirjen/Deputi 8. Peraturan Dirjen/Deputi 9. Peraturan Dirjen/Deputi 10. Peraturan Dirjen/Deputi 11. Peraturan Dirjen/Deputi
2. Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan 3 diatas sudah di sosialisasikan atau di advokasikan? Jika sudah, kepada siapa?	a. Sudah, kepada (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban) 1. Para Eselon I dan II 2. Para Eselon III dan IV 3. LM, PT, Dunia Usaha/swasta 4. OPD terkait di Propinsi

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>5. Lain-lain (sebutkan)</p> <p>b. Belum. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3 Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan/ diadvokasikan?</p>	<p>a. Melalui Surat Edaran (SE), Sebutkan SE nya.....</p> <p>b. Melalui Media Massa,yaitu:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>c. Melalui Forum-forum (sebutkan jenis forum tsb)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	d. Lain-lain (sebutkan): 1. 2. 3. 4. 5.
Program dan kegiatan 4 Apakah ada kegiatan di K/L yang memberikan dampak pada pencapaian kesetaraan gender dalam 2 tahun terakhir? (sebutkan jumlahnya dan nama kegiatannya)	a. Ada, yaitu 1. Kegiatan..... 2. Kegiatan..... 3. Kegiatan..... 4. Kegiatan..... 5. Kegiatan..... 6. Kegiatan..... 7. Kegiatan..... 8. Kegiatan.....

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>9. Kegiatan.....</p> <p>10. Kegiatan.....</p> <p>11. Kegiatan.....</p> <p>b. Persentase kegiatan yang responsif gender terhadap keseluruhan kegiatan K/L%</p> <p>c. Tidak ada kegiatan yang dimaksud di K/L. Mengapa? (Jelaskan)</p>
<p>5 Berapa jumlah kegiatan yang responsif gender yang disusun melalui Proses PPRG dan ARG</p>	<p>a. Jumlah kegiatan yaitu (lampirkan GBSnya):</p> <p>1. Kegiatan</p> <p>2. Kegiatan</p> <p>3. Kegiatan</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>5. Kegiatan</p> <p>6. Kegiatan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>.....</p> <p>7. Kegiatan</p> <p>8. Kegiatan</p> <p>9. Kegiatan</p> <p>10. Kegiatan</p> <p>11. Kegiatan</p> <p>12. Kegiatan</p> <p>13. Kegiatan</p> <p>14. Kegiatan</p> <p>15. Kegiatan</p> <p>16. Kegiatan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>.....</p> <p>17. Kegiatan</p> <p>18. Kegiatan</p> <p>19. Kegiatan</p> <p>20. Kegiatan</p> <p>b. Tidak ada kegiatan yang disusun melalui analisis gender dan GBS</p>
<p>6 Apakah K/L mempunyai kegiatan Inovasi yang mendukung percepatan pelaksanaan PUG ?</p>	<p>a. Ada, yaitu:</p> <p>1. Kegiatan</p> <p>2. Kegiatan</p> <p>3. Kegiatan</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>5. Kegiatan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN

	b. Tidak ada.
	2. Kelembagaan dan pelayanan
7	<p>a. Ada. Jumlahnya K/L, yaitu:</p> <p>1. K/L</p> <p>2. K/L</p> <p>3. K/L</p> <p>4. K/L</p> <p>5. K/L</p> <p>b. Jumlahnya Pemda, yaitu:</p> <p>1. Pemda</p> <p>2. Pemda</p> <p>3. Pemda</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>4. Pemda</p> <p>5. Pemda</p> <p>c. Tidak ada</p>
<p>8 Apakah Kantor K/L Saudara mempunyai fasilitas pelayanan untuk Ibu dan anak?</p>	<p>a. Ya, mempunyai, yaitu:</p> <p>1. Ruang menyusui</p> <p>2. Fasilitas penitipan/pengasuhan anak</p> <p>3. Tempat bermain anak</p> <p>4. Fasilitas lainnya (sebutkan nama dan jumlahnya) jumlahya jumlahya jumlahya jumlahya</p> <p>b. Tidak mempunyai.</p>
<p>3. Anggaran</p>	
<p>9 Berapa alokasi anggaran untuk kegiatan di K/L yang memberikan dampak pada pencapaian kesetaraan gender dalam 2 tahun terakhir?) lihat pertanyaan no. 4)</p>	<p>a. Total anggaran Rp.....</p> <p>b.% dari total APBN K/L</p>
<p>10 Berapa jumlah alokasi anggaran kegiatan responsif gender yang disusun dengan menggunakan instrumen ARG (Pertanyaan no. 5)</p>	<p>a. Jumlah anggaran Rp.</p> <p>b.% dari total APBN K/L, yang terdiri dari:</p> <p>1. Kegiatan.....</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>..... Alokasi anggaran Rp..... 2. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 3. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 4. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 5. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 6. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 7. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 8. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 9. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp.....</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>10. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 11. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 12. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 13. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 14. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 15. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 16. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... 17. Kegiatan..... Alokasi anggaran Rp..... c. Tidak ada anggaran yang disusun dengan instrument ARG</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>4. Peranserta Masyarakat dan jejaring (net-working)</p> <p>11 Berapa Jumlah kajian tentang gender di bidang pembangunan K/L yang dilakukan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha mitra K/L dalam PUG?</p>	<p>a. Jumlah kajian oleh LMkajian, judul-judulnya yaitu:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>b. Jumlah kajian oleh PT/PSW.....kajian, judul-judulnya yaitu:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>c. Jumlah kajian oleh Perusahaan/Dunia Usaha..... kajian, judul-judulnya:</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5.
<p>12 Apakah kajian pada pertanyaan no 11 digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan KL?</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ya. Jelaskan bagaimana menggunakannya b. Tidak atau belum. Jelaskan mengapa?
<p>13 Berapa Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/dunia usaha?;</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pelatihan/advokasi oleh Lembaga Masyarakat adalah (sebutkan jumlahnya) pelatihan/advokasi, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama LM dan jenis pelatihan: 2. Nama LM dan jenis pelatihan: 3. Nama LM dan jenis pelatihan: 4. Nama LM dan jenis pelatihan: b. Pelatihan/advokasi oleh Perguruan Tinggi <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama PT dan jenis pelatihan 2. Nama PT dan jenis pelatihan

PERTANYAAN	JAWABAN
14 Berapa jumlah kegiatan terkait dengan pelebagaan PUG atau kegiatan yang responsif gender yang pelaksanaannya mengikutkan LM/PT/dunia usaha?	3. Nama PT dan jenis pelatihan a. Jumlahnya program/kegiatan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tanggal pengisian (Tgl/bulan/Tahun)
Ketua Pokja PUG K/L
Tanda tangan dan stempel

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA PEMERINTAH PROPINSI

PENJELASAN TENTANG PENGISIAN FORMULIR

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk melihat status OPD di Propinsi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Informasi yang dikumpulkan akan dapat digunakan untuk penilaian kinerja, merencanakan peningkatakan pelaksanaan PUG, menghitung kebutuhan sumber daya, sebagai informasi dasar untuk pengembangan program yang lebih luas dan keperluan lainnya. Karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, maka kebenaran informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan benar, agar pemanfaatannya menjadi maksimal dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan dan hasilnya.

I. KETENTUAN UMUM

Pengisian formulir ini melibatkan seluruh OPD Propinsi.

Dalam melengkapi formulir pemantauan dan evaluasi ini diperlukan kelengkapan dokumen seperti:

1. Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG dan PPRG, termasuk Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang telah dikeluarkan oleh Pemda Propinsi;
2. Semua kebijakan dalam bentuk Pedoman, Juklak, Juknis dll terkait dengan PUG dan PPRG yang telah dikeluarkan oleh Pemda Propinsi; dan
3. Dokumen perencanaan dan penganggaran berupa RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD, KUA/PPAS, RKA OPD dan DPA OPD.

Pada umumnya jawaban dari pertanyaan adalah memilih salah satu pilihan jawaban. Jika pada jawaban yang dipilih diminta untuk memberikan penjelasan, mohon agar dituliskan jawabannya. Untuk Jawaban yang pilihannya dapat lebih dari 1 jawaban, akan diberi keterangan pada pertanyaan tersebut.

II. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Formulir Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG ini di bagi ke dalam dua bagian besar yaitu:

1. Bagian A khusus berkaitan dengan indikator kelembagaan PUG dari 7 prasyarat awal PUG; dan
2. Bagian B khusus berkaitan dengan pelaksanaan PUG.

Penjelasan yang akan diuraikan di bawah ini ditujukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau memungkinkan untuk salah tafsir, sedangkan pertanyaan yang mudah tidak akan diuraikan.

A. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG, 7 Pra-syarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. KOMITMEN

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “kebijakan” ini adalah aturan tertulis yang bersifat mengatur (*regelling*) dan mengikat yang dikeluarkan oleh

Pemda Propinsi berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di Propinsi Saudara seperti Perda, PerGub atau lainnya.

Pertanyaan Nomor 2 – 3 jelas

Pertanyaan Nomor 4

Yang dimaksud kebijakan teknis operasional adalah aturan teknis sebagai upaya tindak lanjut dari kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan nomor 1 diatas yang dikeluarkan oleh Pemda Propinsi.

Pertanyaan Nomor 5 – 7 jelas

Pertanyaan Nomor 8

Yang dimaksud dengan Rencana Pencapaian PUG adalah rencana kegiatan dan capaian PUG di Propinsi untuk selama minimal 3 tahun yang dikeluarkan oleh Gubernur, atau Sekretaris daerah atau Kepala Bappeda. Di daerah namanya dapat berbeda, maka didalam pertanyaan nomor 8 ini diberikan pilihan yang paling cocok dengan yang dipunyai daerah, kalau tidak ada yang sesuai, silakan tulis dalam kolom jawaban lain-lain.

2. KEBIJAKAN

Dokumen Perencanaan

Pertanyaan Nomor 9

Dokumen RPJMD/RKPD dikatakan responsif gender manakala memuat: Acuan hukum PUG, Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, adanya isu-isu gender dan anak, visi dan misinya baik tersurat maupun tersirat, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, dan indikator gender, saudara diberikan pilihan untuk mengisi yang memang ada dalam RPJMD/RKPD.

Pertanyaan Nomor 10

Pertanyaan ini khusus untuk diisi oleh Dinas PPPA/KB atau sejenisnya dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada penjelasan nomor 9.

Pertanyaan Nomor 11

Pertanyaan ini berapa Renstra masing-masing OPD yang sudah memenuhi ke kriteria perencanaan responsif gender sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan nomor 10 diatas.

Dokumen Anggaran

Pertanyaan Nomor 12

Setiap tahun Pemerintah Propinsi mengeluarkan KUA/PPAS untuk acuan dalam menyusun RKA-PD tahun mendatang, apakah dalam KUA/PPAS tersebut telah mengakomodasikan isu gender dan anak di dalamnya, dalam kolom jawaban hanya menjelaskan “sudah ada” mohon diberi penjelasan, atau “belum ada” juga diberikan penjelasan.

Pertanyaan Nomor 13

Hal yang sama pada setiap Daerah pada persiapan tahun mendatang dalam penyusunan RKA-OPD selalu dikeluarkan “Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA-OPD”, apakah dalam pedoman tersebut sudah diatur tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender atau dalam bentuk lainnya seperti SE Bupati/Walikota, Sekda atau BAPPEDA.

3. KELEMBAGAAN

Pertanyaan Nomor 14

Yang dimaksud unit kerja yang menangani PUG adalah unit eselon yang menangani langsung pelaksanaan PUG di bawah Dinas PPPA/KB atau sejenisnya, bisa eselon 3, atau eselon 4 dan bahkan non eselon, dalam kolom jawaban ada pilihan yang paling tepat untuk Provinsi Saudara.

Pertanyaan Nomor 15-16 jelas

Pertanyaan Nomor 17

Yang dimaksud dengan Tim Teknis dalam pertanyaan nomor 17 adalah ini adalah tim teknis sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud lembaga “*drivers*” atau lembaga penggerak adalah Bappeda, DPPPA/KB, Badan/Dinas Keuangan Daerah, dan Inspektorat. Yang dimaksud dalam pertanyaan nomor 17, Saudara diminta untuk menjelaskan peran masing-masing lembaga tsb. dalam mendorong PUG di Kabupaten/Kota (lihat kolom jawaban).

Pertanyaan Nomor 19 jelas

4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber Daya manusia

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud perencana disini adalah perencana di masing OPD yang telah mengikuti pelatihan PPRG dan mendapatkan sertifikat baik yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA atau Pemda Provinsi.

Pertanyaan Nomor 21

Yang dimaksud auditor terlatih disini adalah auditor di Inspektorat Propinsi yang telah mengikuti pelatihan PPRG dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

Pertanyaan Nomor 22

Yang dimaksud fasilitator disini adalah Fasilitator yang dipunyai Propinsi baik berasal dari OPD Propinsi, PSW/G, maupun dari Lembaga Masyarakat, yang telah mengikuti pelatihan TOT PPRG yang dilaksanakan oleh KPPPA atau Pemda Propinsi.

Pertanyaan Nomor 23

Yang dimaksud "*Champion Gender*" disini adalah seseorang apakah dia itu pejabat atau istri pejabat, Aktivistis LM, PSW/G yang selalu konsern atau memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan PUG dan pencapaian kesetaraan gender di daerah itu.

Anggaran daerah

Pertanyaan Nomor 24-27

Yang dimaksud alokasi anggaran untuk fasilitasi PPRG adalah yang ada pada lembaga Bappeda, DPPPA atau sejenisnya, Badan/Dinas Keuangan, dan Inspektorat (diluar anggaran sekretariat masing-masing unit) yang digunakan untuk kegiatan mendorong PUG di Propinsi contoh: Bappeda mempunyai kegiatan untuk *Capacity Building* Bappeda Propinsi tentang PPRG bagi internal BAPPEDA, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG dstnya.

Pertanyaan Nomor 28

Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 28 adalah hampir sama dengan pertanyaan nomor 24-27 namun dalam pertanyaan nomor 28 khusus utk OPD diluar lembaga penggerak (pertanyaan nomor 24-27) yang mempunyai anggaran untuk kegiatan fasilitasi PUG/PPRG di internal OPD nya atau dengan OPD sejenisnya di Kabupaten/Kota.

5. DATA, SISTIM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI

Pertanyaan Nomor 29-33 jelas

Pertanyaan Nomor 34

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 34 adalah dimana data terpilah tersebut sudah diresmikan dengan SK dan masuk dalam sistem data daerah.

Pertanyaan Nomor 35 jelas.

Pertanyaan Nomor 36

Yang dimaksud dengan bahan Informasi dalam promosi PUG bisa dalam bentuk buku laporan pelaksanaan PUG di daerah yang diterbitkan oleh daerah, atau mungkin buku-buku seperti “Buku Saku PPRG”, bahan informasi berbentuk elektronik dan lain-lain seperti tercantum dalam kolom jawaban pertanyaan nomor 36.

Pertanyaan Nomor 37 jelas.

6. METODE DAN TOOL

Pertanyaan Nomor 38-41 jelas.

7. PERANSERTA MASYARAKAT

Pertanyaan Nomor 42 jelas

Pertanyaan Nomor 43

Yang dimaksud dengan Forum koordinasi adalah Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat (PUSPA adalah singkatan dari Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak) yang sudah terbentuk di Propinsi.

Pertanyaan 44-45 jelas.

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PUG

1. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan Provinsi

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan kebijakan responsif gender pada pertanyaan ini adalah peraturan per-undang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan usaha penyelesaian atau memperkecil isu-isu gender dan anak di Propinsi selain kebijakan

PUG. Kebijakan itu bisa dalam bentuk Perda, PerGub, atau mungkin Sekda atau kepala Bappeda, seperti Perda tentang perlindungan anak, PerGub tentang TPPO, Perda tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan, SE tentang gugus tugas trafiking, dan lain-lain.

Pertanyaan Nomor 3 - 4, jelas

Program

Pertanyaan Nomor 5

Yang dimaksud program responsif gender pada pertanyaan ini adalah program-program yang langsung atau tidak langsung mampu menyelesaikan atau memperkecil kesenjangan gender dan isu anak. Contoh program bantuan beasiswa berprestasi, dan lain-lain

Pertanyaan Nomor 6

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor ini, merujuk kepada program-program yang disebutkan dalam nomor 5 diatas, menurut saudara program mana yang merupakan inovasi dan terobosan yang memang dibuat untuk menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender dan anak di daerah itu contoh, program untuk peningkatan Usaha Ekonomi bagi perempuan pedesaan, dan lain-lain.

Kegiatan

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud kegiatan responsif gender pada pertanyaan ini adalah:

- a. Kegiatan responsif gender melalui proses GAP dan GBS adalah kegiatan yang telah dilakukan analisis gender dengan metode GAP atau lainnya, dan disusun GBSnya;
- b. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam poin b masing-masing dilampiri GBS nya.

Pertanyaan Nomor 8 cukup jelas

Pertanyaan Nomor 9

Adalah kegiatan yang mengakomodasikan kesenjangan gender atau menyelesaikan masalah gender yang penyusunannya tidak atau belum melalui proses PUG/PPRG/ARG, namun diterbitkan karena perhatian dari Pemda, Kepala Daerah, atau inisiatif DPRD atau merupakan perluasan atau terjemahan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pada tingkat nasional.

2. FASILITASI KEGIATAN PUG DI KABUPATEN/KOTA

Pertanyaan Nomor 10

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 10 ini adalah arahan atau petunjuk dalam bentuk Surat Edaran atau Surat atau jenis lainnya dari Gubernur kepada para Bupati dan Walikota di wilayah propinsi itu tentang usaha percepatan pelaksanaan PUG di Kab/kota se-propinsi saudara.

Pertanyaan Nomor 11

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 11 adalah ikatan kerjasama atau MOU atau bentuk lainnya antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung komitmen para Bupati/Walikota untuk pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota tersebut.

Pertanyaan Nomor 12-14 Jelas

Pertanyaan Nomor 15

Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 15 adalah jumlah anggaran yang tersedia dalam APBD untuk memfasiliasi pelaksanaan PUG/PPRG di Kabupaten/kota pada tahun yang lalu dan tahun berjalan.

3. PELAYANAN

Pertanyaan nomor 16

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 16 ini adalah Provinsi atau Kabupaten/Kota lain di luar Kabupaten/Kota Saudara, yang telah

atau sedang melakukan kunjungan studi banding, ikut pelatihan PPRG, dan lain-lain dengan maksud untuk belajar dan berbagi pengalaman kegiatan PPRG di Provinsi Saudara.

Pertanyaan Nomor 17

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 18 ini adalah lembaga-lembaga pelayanan yang dibentuk atau pengelolaannya berada dibawah Pemerintah Provinsi seperti P2TP2A, UPT-UPT layanan korban KTA/KTP maupun perdagangan orang.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 18 ini adalah jumlah tenaga pelayanan medis, konselor, pendamping hukum dan pelayanan lainnya yang tersedia dan siap melayani korban di di tempat-tempat pelayanan seperti P2TP2A, UPT, Rumah Sakit Provinsi dan tempat-tempat lainnya sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Jika ada fungsi yang dirangkap, maka dianggap hanya 1 tenaga di salah satu jenis tenaga pelayanan.

Pertanyaan Nomor 19

Jumlah korban kekerasan yang melapor ke unit-unit pelayanan dalam 12 bulan terakhir.

Pertanyaan Nomor 20

Adalah persentase jumlah tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor dalam 12 bulan terakhir (jawaban Nomor 18e dibagi dengan jawaban Nomor 19-jumlah korban kekerasan yang melapor).

Pertanyaan Nomor 21

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 21 ini, adalah OPD yang telah mempunyai tempat pelayanan untuk perempuan dan anak seperti ruang laktasi, ruang pengasuhan anak/bayi dan lain-lain di kantornya.

4. ANGGARAN

Pertanyaan Nomor 22

Yang dimaksud pertanyaan nomor 22 ini adalah anggaran yang ada pada pemerintah Provinsi yang memang langsung ataupun tidak langsung mampu menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender dan anak di Provinsi saudara dengan dana APBD. Anggaran ini bisa bersifat anggaran untuk spesifik perempuan atau laki-laki, anggaran untuk *capacity building*, dan anggaran kesetaraan gender. Mungkin sebagian sudah dilakukan melalui proses PPRG, ARG, namun sebagian besar belum, silakan untuk disebutkan dalam kolom jawaban.

Pertanyaan Nomor 23

Seperti pertanyaan nomor 22 namun berasal dari anggaran Non-APBD bisa dari APBN, Hibah bantuan Luar Negeri, Dunia usaha, Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya.

5. PERANSERTA MASYARAKAT DAN JEJARING

Pertanyaan Nomor 24

Kegiatan Sinergis adalah kegiatan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan melibatkan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat dan menggunakan kemampuan masing-masing Lembaga Masyarakat yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.

Pertanyaan Nomor 25

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 25 adalah jumlah program dan kegiatan responsif gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya yang melibatkan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi/PSW dan dunia usaha.

Pertanyaan nomor 26

Yang dimaksud kajian dalam pertanyaan nomor 26 ini adalah kajian kebijakan publik berkaitan dengan isu gender dan anak dalam pembangunan daerah baik yang dilakukan PSW/LM atau pun dunia usaha sendiri, atau dalam rangka kerjasama Pemda dengan PSW/LM/Dunia usaha.

Pertanyaan nomor 27 cukup jelas

Pertanyaan Nomor 28

Yang dimaksud pertanyaan Nomor 28 adalah kegiatan pelatihan/advokasi PPRG atau pelatihan berkaitan dengan gender yang dilaksanakan.

Pertanyaan 29

Jumlah PSW atau Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha yang melaksanakan program/kegiatan yang responsif gender secara mandiri (dengan anggaran sendiri).

Pertanyaan Nomor 30 jelas

**FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

IDENTITAS PROVINSI

1. Nama Provinsi	:	
2. Nama Dinas yang menangani PPPA	:	
3. Nama Kepala Dinas	:	
4. Alamat	:	
5. Telepon/Fax/E-mail	:	
6. Nama dan telepon kontak person	:	

A. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG DI DAERAH

PERTANYAAN		JAWABAN
8. KOMITMEN		
Kebijakan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)		
1	Apakah Provinsi Saudara memiliki kebijakan tentang pengarusutamaan gender?	<p>a. Ya. Bentuknya:</p> <p>1. Perda : Nomor : tentang (Lampirkan)</p> <p>2. Peraturan Gubernur: Nomor: tentang (Lampirkan)</p> <p>3. Lainnya :(Lampirkan)</p> <p>b. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
2	Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan diatas sudah di sosialisasi/ advokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	<p>a. Sudah, kepada:</p> <p>5. Para kepala OPD</p> <p>6. Anggota legislatif</p> <p>7. LM, PSW/G dan dunia usaha/swasta</p> <p>8. Aparat Penegak hukum</p> <p>9. Lembaga Bantuan Hukum</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>

3	<p>Bagaimana peraturan tersebut dikomunikasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Khusus kepada OPD melalui Surat Edaran (nama jabatan) Nomor tentang</p> <p>b. Melalui Media Massa (jelaskan)</p> <p>c. Melalui Forum (sebutkan forum apa)</p> <p>d. Seminar/workshop (sebutkan)</p> <p>e. Lainnya, sebutkan.</p>
<p>Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah</p>		
4	<p>Apakah di Propinsi Saudara sudah ada kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang PUG ?</p>	<p>a. Ada. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Gubernur Nomor : Tahun tentang 2. SE Gubernur Nomor : Tahun tentang 3. SE Sekda Gubernur Nomor : Tahun tentang 4. Lain-lain, sebutkan; <p>b. Tidak/belum ada. Mengapa? Jelaskan</p>

5	<p>Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan No. 4 diatas sudah di sosialisasi/di advokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>.....</p> <p>c. Sudah, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD; 2. Anggota DPRD 3. LM, PSW/G dan dunia usaha/swasta 4. Aparat Penegak hukum 5. Lembaga Bantuan Hukum <p>d. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
6	<p>Bagaimana Peraturan tersebut disosialisasikan/ diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan PPRG; 2. Bimbingan teknis; 3. Advokasi dan sosialisasi 4. Lainnya, sebutkan <ol style="list-style-type: none"> a. b. <p>b. Belum disosialisasikan. Mengapa? (jelaskan)</p>
7	<p>Berapa jumlah OPD yang telah mendapat</p>	<p>a. OPD</p>

	sosialisasi tentang kebijakan teknis operasional PPRG di provinsi	b.% dari semua OPD
Rencana pencapaian PUG di masing- masing OPD		
8	Apakah Propinsi mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA? Apa nama rencana tersebut?	<p>a. Ya, disahkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Propinsi 2. Rencana Kerja POKJA PUG Propinsi 3. Roadmap/Peta jalan PUG Propinsi 4. Lainnya. Sebutkan <p>b. Belum ada. Mengapa? Jelaskan</p>
1. KEBIJAKAN		
Dokumen perencanaan		
9	Apakah dokumen RPJMD/RKPD telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender sebagai berikut? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	<p>a. Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan; Sebutkan</p> <p>b. Datanya terpilah berdasarkan jenis kelamin Bagian mana</p>

		<p>c. Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah Jelaskan</p> <p>d. Masuk dalam Visi dan Misi Jelaskan</p> <p>e. Masuk ke dalam Program dan kegiatan Sebutkan</p> <p>f. Indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan Jelaskan</p>
10	<p>Apakah Renstra/Renja Dinas PPPA telah responsif gender dan memuat hal-hal tentang kesetaraan gender sebagai berikut? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>g. Kesetaraan gender belum masuk di dalam RPJMD/RKPD</p> <p>a. Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan Sebutkan</p> <p>b. Datanya terpilah berdasarkan jenis kelamin Di bagian mana?</p>

		<p>c. Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah Jelaskan</p> <p>d. Masuk ke dalam Program dan kegiatan Sebutkan</p> <p>e. Indikator pencapaian kinerja urusan wajib pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari indikator keberhasilan. Jelaskan</p> <p>f. Belum masuk di dalam Renstra</p>
11	Berapa jumlah Renstra OPD yang menurut penilaian Saudara sudah responsif gender (dinilai dengan menggunakan kriteria seperti pada pertanyaan nomor 10)	<p>a. Jumlah Resntra OPD yang responsive gender adalah (Lampirkan bagian dari dokumen yang terkait)</p> <p>b. % dari semua Renstra OPD</p>
Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)		
12	Apakah isu gender dan anak sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS?	<p>a. Sudah, pada bagian Lampirkan</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>

13	<p>Apakah dalam Pedoman penyusunan dan Penelaahan RKA-OPD sudah diakomodasikan proses penyusunan ARG di masing-masing OPD</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>c. Sudah (sebutkan bagian mana)</p> <p>.....</p> <p>d. Belum, mengapa?</p> <p>Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2. KELEMBAGAAN		
14	<p>Sebutkan nama unit kerja yang menangani PUG di bawah Dinas PPPA?</p>	<p>a. Eselon 3, (sebutkan); Bidang</p> <p>.....</p> <p>b. Eselon 4, (sebutkan) Subidang</p> <p>.....</p> <p>c. Non Eselon dibawah Bidang</p> <p>Mengapa?</p> <p>Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
15	<p>Apakah ada Kelompok Kerja PUG di Provinsi? Jika ada, ditetapkan dengan</p>	<p>a. Ada, ditetapkan dengan:</p> <p>1. Keputusan Gubernur</p> <p>Nomor : tentang (lampirkan)</p>

		<p>2. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>3. Keputusan Kepala Bappeda Nomor : tentang(lampirkan)</p> <p>4. Keputusan Kepala Dinas PPPA Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>b. Belum ditetapkan atau belum ada Pokja. Mengapa? Jelaskan </p>
16	Berapa jumlah OPD yang mewakili dalam POKJA PUG? (bila jawaban pertanyaan no 15 ada)	<p>c. Jumlah OPD yang mewakili di Pokja PUG.....OPD</p> <p>d.% dari semua OPD</p> <p>e. Belum ada POKJA PUG</p>
17	Apakah sudah ada Tim Teknis PUG di Propinsi	<p>1. Sudah ada. Ditetapkan dengan SK Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>2. Belum ada, Mengapa? Jelaskan </p>
18	Apakah lembaga penggerak (“drivers”) sudah berperan dalam pokja? Jelaskan peran masing-masing?	<p>a. Sudah. 1. BAPPEDA Berperan sebagai: </p>

	<p>.....</p> <p>2. DPPPA/KB atau sejenisnya berperan sebagai:</p> <p>.....</p> <p>3. Dinas keuangan daerah atau sejenisnya Berperan sebagai:</p> <p>.....</p> <p>4. Inspektorat Daerah berperan sebagai:</p> <p>.....</p> <p>b. Belum ada yang berperan</p>
19	<p>Apakah OPD-OPD sudah mempunyai focal point?</p> <p>a. Sudah, jumlah OPD yang mempunyai focal point berjumlah</p> <p>b. % dari semua OPD</p>
3. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN	
Sumberdaya Manusia	
20	<p>Apakah masing-masing OPD sudah mempunyai perencanaan yang terlatih untuk melaksanakan PPRG di masing-masing OPDnya</p> <p>a. Sudah.</p> <p>1. Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang sudah dilatih PPRG dan sudah mendapatkan sertifikatOPD</p> <p>2. Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang sudah dilatih namun belum mendapatkan sertifikatOPD</p> <p>3. Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang terlatih (no 1+ no 2)</p> <p>OPD</p> <p>4.% dari semua OPD (no. 3 dibagi jumlah semua OPD)</p>

		<p>b. Belum ada OPD yang memiliki. Mengapa? Jelaskan</p>
21	<p>Apakah Inspektorat sudah mempunyai auditor yang sudah terlatih?</p>	<p>a. Sudah. 1. Inspektur pembantu..... orang 2. Auditororang b. Belum ada. Mengapa? Jelaskan</p>
22	<p>Apakah Propinsi mempunyai fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator?</p>	<p>a. Ya. 1. Mempunyai (Lampirkan sertifikatnya) 2. Yang berasal dari Dinas PPPA orang 3. Yang berasal OPD lain orang 4. Yang berasal dari PT/Univorang 5. Yang berasal dari Lembaga Masyarakat orang b. Jumlah seluruh fasilitator orang c. % terhadap jumlah semua OPD di Kab/Kota d. Belum mempunyai fasilitator</p>
23	<p>Berapa jumlah Champion Gender di Propinsi dalam 2 tahun terakhir ini?</p>	<p>c. orang d. tidak ada Jelaskan</p>

	
	Anggaran daerah untuk kelembagaan PUG	
24	Berapa alokasi anggaran Dinas PPPA/KB atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG?	<p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggaran Dinas PPPA/KB atau sejenisnya (diluar anggaran sekretariat)</p> <p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
25	Berapa alokasi anggaran di Bappeda untuk fasilitasi PUG?	<p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggran BAPPEDA diluar anggaran sekretariat</p> <p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
26	Berapa alokasi anggaran Biro/Badan Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG?	<p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggaran Dinas Keuangan daerah atau sejenisnya diluar anggaran secretariat</p> <p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
27	Berapa alokasi anggaran di Inspektorat Propinsi untuk Fasilitasi PUG?	<p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggaran Inspektorat Provinsi (diluar anggaran sekretariat)</p>

28		<p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
	<p>Berapa jumlah OPD (diluar lembaga drivers) Propinsi yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll.)</p>	<p>a. JumlahOPD, yaitu:</p> <p>1. OPD:</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>2. OPD:</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>3. OPD:</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>4. OPD:</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>5. OPD:</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>6. OPD:</p>

	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>7. OPD:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>8. OPD:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>9. OPD:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>10. OPD:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>11. OPD:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>b. Tidak ada</p>
	<p>4. DATA, SISTIM INFORMASI DAN KIE</p>
29	<p>Apakah sudah terbentuk Forum Data lintas</p> <p>a. Sudah.</p>

	<p>OPD?</p>	<p>1. Apakah namanya? Sebutkan dan SK pembentukannya Forum data Surat Keputusan (SK) (nama jabatan) Nomor (nama jabatan) Nomor</p> <p>2. Berapa OPD yang termasuk dalam forum data? OPD b. Belum terbentuk</p>
<p>30</p>	<p>Apakah ada lembaga di luar OPD yang menjadi anggota Forum Data tersebut?</p>	<p>a. Ada, yaitu: 1. Lembaga 2. Lembaga 3. Lembaga 4. Lembaga 5. Lembaga b. Tidak ada Jelaskan</p>

31	Apakah Statistik/ Profil gender provinsi sudah ada?	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>a. Sudah. (sebutkan namanya dan lampirkan Cover bukunya)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Belum, mengapa?</p> <p>Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
32	Apakah "Daerah Dalam Angka", datanya sudah terpilah menurut jenis kelamin?	<p>a. Sudah. Berikan contohnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Belum. Mengapa?</p> <p>Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
33	Berapa jumlah OPD yang telah mempunyai Data terpilah ?	<p>a. OPD</p> <p>b. % dari semua OPD</p> <p>c. Belum ada. Mengapa?</p> <p>Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

34	Apakah data terpilih sudah menjadi bagian dari sistem data Provinsi?	<p>a. Sudah. Ditetapkan dengan SK (nama jabatan) Nomor (nama jabatan) Nomor</p> <p>b. Sudah, tetapi belum ditetapkan dengan SK</p> <p>c. Belum Ada Jelaskan</p>
35	Apakah data dan statistik gender sudah dapat diakses melalui Website Pemda?	<p>a. Sudah, Pada bagian dari website (lampirkan foto halaman Website)</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
36	Dalam rangka promosi pelaksanaan PUG/PPRG, apakah Propinsi mempunyai bahan informasi yang digunakan di Propinsi?	<p>a. Ya. Mempunyai dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan 2. Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah ; 3. Bahan KIE utk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur 4. Media massa elektronik 5. Media massa cetak 6. Media sosial

	<p>b. Tidak mempunyai</p> <p>a. Anggota DPRD</p> <p>b. Pimpinan OPD</p> <p>c. Perencana OPD</p> <p>d. Lembaga Masyarakat, PT dan Dunia Usaha.</p> <p>e. Pemerintah kabupaten/Kota</p> <p>f. Lain-lain (sebutkan)</p>	
37	<p>Siapa sasaran Promosi PUG/PPRG sebagaimana disebutkan dalam nomor 37 diatas ? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	
	5. METODE DAN TOOL	
38	<p>Apakah Propinsi Saudara menerbitkan Pedoman Teknis pelaksanaan PUG ?</p>	<p>a. Ya, judulnya</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
39	<p>Apakah ada Modul pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan Propinsi?</p>	<p>a. Ada, (sebutkan judulnya)</p> <p>b. Belum ada (jelaskan)</p>
40	<p>Metode analisis gender apa yang digunakan di propinsi?</p>	<p>a. Gender Analysis Pathway</p> <p>b. PROBA (Problem-based Analysis)</p>

	(Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	<p>c. SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>)</p> <p>d. Lainnya, sebutkan!</p> <p>e. Belum ada (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
41	Apakah daerah Saudara telah menerbitkan Pedoman Audit yang responsif gender?	<p>a. Sudah, sebutkan judulnya</p> <p>.....</p> <p>b. Belum. Mengapa? (Jelaskan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6. PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA		
42	<p>Apakah ada Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha termasuk dalam Pokja PUG?</p> <p>(Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Ya.</p> <p>Jumlah Lembaga Masyarakat yang terlibat, adalah.....yang terdiri dari:</p> <p>1.</p> <p>.....</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>3.</p> <p>.....</p> <p>4.</p> <p>.....</p>

		<p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p>
		<p>b. Jumlah Perguruan Tinggi/Akademisi yang terlibatYang terdiri dari:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7. Dst..</p> <p>c. Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha yang terlibat adalah.....(sebutkan) :</p> <p>1.</p> <p>2.</p>

		<p>3.</p> <p>4.</p> <p>5. Dst</p>
43	<p>Apakah sudah ada Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang di sahkan?</p>	<p>d. Tidak ada yang termasuk dalam PokjaPUG</p> <p>a. Sudah ada, disahkan dengan S.K. (nama jabatan) Nomor (nama jabatan) Nomor.....</p> <p>b. Jumlah lembaga yang berada dalam forum adalah..... Lembaga</p> <p>c. Belum ada Forum Puspa, Mengapa? Jelaskan</p>
44	<p>Kegiatan apa yang melibatkan Lembaga Masyarakat, PSW/G, dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender dan anak</p> <p>b. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan</p> <p>c. Pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p>e. Layanan masyarakat TKA/TKP/TPPO</p> <p>f. Lainnya, sebutkan!</p>

45	<p>Berapa jumlah dan apa nama dari LM, PT dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PP?</p>	<p>g. Belum melibatkan</p> <p>a. Lembaga Masyarakat, Jumlah yang terlibat....., yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. <p>b. Perguruan Tinggi, Akademi Jumlah yang terlibat....., yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.
----	--	--

.....	
2.	
3.	
4.	
5.	
c. Perusahaan/Dunia Usaha Jumlah yang terlibat....., yaitu:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PUG DI DAERAH

PERTANYAAN		JAWABAN
1. Kebijakan, Program Dan Kegiatan		
Kebijakan		
1	Apakah ada Kebijakan Propinsi yang responsif gender yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir?	<p>a. Ada.</p> <p>Peraturan Daerah (sebutkan):</p> <p>1. Perda nomor tentang</p> <p>2. Perda nomor tentang</p> <p>3. Perda nomor tentang</p> <p>Peraturan Kepala Daerah (sebutkan):</p> <p>1. Nomor tentang</p> <p>2. Nomor tentang</p> <p>3. Nomor tentang</p> <p>4. Nomor tentang</p> <p>Bentuk lainnya (selain Perda, dan Perbup/Walkot), sebutkan</p> <p>1. Nomor tentang</p> <p>2. Nomor tentang</p> <p>3. Nomor tentang</p> <p>4. Nomor tentang</p> <p>b. Tidak ada</p>
2	Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 diatas sudah di	<p>a. Anggota DPRD</p> <p>b. Para Kepala OPD</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>sosialisasikan atau di advokasikan? Jika sudah, kepada siapa? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>c. LM, PSW/G, Dunia Usaha/swasta d. Aparat Penegak hukum e. Lembaga bantuan hukum f. Kabupaten/Kota g. Lain-lain (sebutkan), h. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
<p>3 Bagaimana peraturan tersebut diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Melalui Surat Edaran (SE), Sebutkan SE nya b. Melalui Media Massa Jelaskan c. Melalui Forum-forum (sebutkan jenis forum tsb) d. Lain-lain (sebutkan)</p>
<p>4 Apakah kebijakan pada butir 1 sudah dijadikan acuan bagi OPD dalam</p>	<p>a. Sudah jelaskan</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	b. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan
Kegiatan 7 Apakah ada kegiatan di daerah yang responsif gender (disusun dengan proses PUG/PPRG dan dilaksanakan, dalam 2 tahun terakhir?	a. Ada. Sebutkan. (Lampirkan GBS dari kegiatan-kegiatan tersebut) Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

PERTANYAAN	JAWABAN
8	<p>b. Tidak ada.</p> <p>a. Jumlah OPD yang sudah melaksanakan terdiri dari:</p> <p>1. Dinas</p> <p>2. Dinas</p> <p>3. Dinas</p> <p>4. Dinas</p> <p>5. Dst..</p> <p>b. % dari seluruh OPD Kab/Kota</p>
9	<p>a. Ada.</p> <p>1. Kegiatan</p> <p>2. Kegiatan</p> <p>3. Kegiatan</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>5. Kegiatan</p>

PERTANYAAN		JAWABAN	
		b. Tidak ada	
2. Fasilitas kegiatan PUG di Kabupaten/Kota			
10	Apakah ada arahan atau petunjuk dari Pemda Propinsi kepada Pemda Kabupaten pelaksanaan PUG (lampirkan)	a. Ada, sebutkan	b. Tidak ada. Mengapa?
11	Apakah ada MOU atau kesepakatan kerjasama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kab/Kota tentang pelaksanaan PUG	a. Ada, dengan Kab/Kota, yaitu: 1. Kab/Kota 2. Kab/Kota 3. Kab/Kota 4. Kab/Kota 5. Kab/Kota 6. Kab/Kota 7. Kab/Kota 8. Kab/Kota 9. Kab/Kota 10. Kab/Kota	

PERTANYAAN	JAWABAN
12 Berapa Kabupaten/Kota di Provinsi Saudara yang telah mempunyai dasar hukum untuk pelaksanaan PUG?	<p>b. Tidak ada.</p> <p>a. Jumlah Kabupaten Kota yang mempunyai Perda: Kabupaten/Kota yang mempunyai PerBup/Walikota.....</p> <p>c. Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai dasar hukum lain.....</p> <p>d. % Kabupaten/Kota yang mempunyai dasar hukum dari semua Kab/Kota</p> <p>e. Tidak ada</p>
13 Berapa Kabupaten/kota di Provinsi Saudara yang telah membentuk POKJA PUG dengan SK Bupati/Walikota?	<p>a. Kab/kota</p> <p>b.% dari jumlah kab/kota</p> <p>c. Tidak ada</p>
14 Berapa Kab/Kota di Provinsi Saudara yang sudah difasilitasi untuk melaksanakan PUG dengan anggaran Dinas PPPA dalam 2 tahun terakhir?	<p>a.Kab/kota</p> <p>b. % dari jumlah kab/kota</p> <p>c. Tidak ada</p>
15 Apakah ada alokasi anggaran Dinas PPPA untuk memfasilitasi pelaksanaan PUG di Kab/Kota tahun 2017 dan tahun berjalan?	<p>a. Ada (lampirkan bagian dokumen yang memperlihatkan alokasi tersebut)</p> <p>Jumlah Rp</p> <p>b. Tidak ada</p>
3. Pelayanan	
16 Berapa jumlah Provinsi lain dan kabupaten/Kota yang belajar PUG di Propinsi ini dalam 2 tahun terakhir?	<p>a. Ada. Sebutkan:</p> <p>1. Propinsi/Kab/Kota</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	2. Propinsi/Kab/Kota 3. Propinsi/Kab/Kota 4. Propinsi/Kab/Kota 5. Propinsi/Kab/Kota
17 Apakah Provinsi Saudara mempunyai Sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?	b. Tidak ada a. Ya, mempunyai 1. Berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 2. Berbentuk P2TP2, Jumlahnya..... 3. Berbentuk Women Crisis Center atau sejenisnya, Jumlahnya..... 4. Berbentuk Lembaga Advokasi Hukum, Jumlahnya..... 5. Berbentuk lembaga lain, Sebutkan nama Jumlahnya 6. Berbentuk lembaga lain, Sebutkan nama Jumlahnya b. Tidak ada
18 Berapa jumlah tenaga pelayanan terlatih	a. Jumlah tenaga medis

PERTANYAAN	JAWABAN
yang ada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di Rumah Sakit tingkat Kabupaten.....orang 4. Di Puskesmas..... orang 5. Di tempat pelayanan lainnya orang <p>b. Jumlah tenaga konselor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di Rumah Sakit tingkat kabupatenorang 4. Di Puskesmas orang 5. Di tempat pelayanan lainnya orang <p>c. Jumlah tenaga pendamping hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di fasilitas pelayanan lainnya.....orang <p>d. Jumlah tenaga pelayanan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di Rumah Sakit tingkat kabupaten orang

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>4. Di Puskesmas orang</p> <p>5. Di tempat pelayanan lainnya orang</p>
<p>19 Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di sarana pelayanan yang dikelola tingkat Provinsi dalam 12 bulan terakhir</p>	<p>e. Jumlah seluruh petugas (medis, konselor, pendamping hukum, tenaga pelayanan lainnya)orang Jumlah korban yang melapor adalah..... orang</p>
<p>20 Persentase jumlah semua tenaga pelayanan (jawaban no 18 e) terhadap jumlah kasus yang melapor</p>	<p>.... % jumlah tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang tercatat melapor</p>
<p>21 Berapa jumlah Kantor OPD yang mempunyai fasilitas untuk Ibu dan anak?</p>	<p>c. Penetapan/pengasuhan anak</p> <p>1. Jumlah.....OPD</p> <p>2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD</p> <p>d. Ruang menyusui</p> <p>1. JumlahOPD</p> <p>2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD</p> <p>e. Tempat bermain anak</p> <p>1. Jumlah OPD</p> <p>2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD</p> <p>f. Fasilitas lainnya (sebutkan namanya)</p> <p>1. Jumlahnya.....OPD</p> <p>2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	g. Fasilitas lainnya (sebutkan namanya) 1. Jumlahnya OPD 2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD
4. Anggaran 22 Berapa Total anggaran pemda yang responsif gender yang bersumber dari APBD 23 Berapa jumlah anggaran non APBD yang ditujukan untuk menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender dan dari mana sumbernya? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	a. Jumlah dalam Rp b.% dari anggaran Pembangunan a. Bantuan Luar Negeri Rp b. Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Rp c. APBN Rp d. Lain lain (sebutkan) Rp e. Tidak ada anggaran selain APBD Provinsi
5. Peranserta Masyarakat dan jejaring (net-working) 24 Berapa Kegiatan yang sifatnya sinergis yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama dengan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat dan dengan tujuan yang sama dalam 1 tahun terakhir	a. kegiatan (sebutkan dan lampirkan dokumen pendukung) 1. Kegiatan 2. Kegiatan

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>.....</p> <p>3. Kegiatan</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>b. tidak ada</p>
<p>25 Berapa Jumlah program/kegiatan yang mengikutkan Masyarakat/Perguruan usaha dalam 2 tahun terakhir?</p>	<p>a. program, yaitu:</p> <p>1. Program/Kegiatan</p> <p>2. Program/Kegiatan</p> <p>3. Program/Kegiatan</p> <p>4. Program/Kegiatan</p>
<p>26 Berapa Jumlah kajian yang dilakukan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha tentang gender dalam pembangunan atau PUG dalam 4 tahun terakhir?</p>	<p>a. Jumlah kajian oleh Perguruan Tinggi Judul/Topik. Yaitu</p> <p>1. Judul:.....</p> <p>2. Judul:</p> <p>3. Judul:</p> <p>4. Judul :.....</p>

PERTANYAAN	JAWABAN

	5. Judul:
	6. Judul:
	b. Jumlah kajian oleh Lembaga Masyarakat Judul/topik. 1. Judul:
	2. Judul:
	3. Judul:
	4. Judul:
	5. Judul:
	6. Judul:
	c. Jumlah kajian oleh Dunia UsahaJudul/Topik 1. Judul:

PERTANYAAN	JAWABAN
	2. Judul: 3. Judul: 4. Judul: 5. Judul: d. Tidak ada kajian
27 Apakah hasil kajian pada butir 26 sudah digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan pembangunan di daerah ?	a. Sudah, Jelaskan b. Belum, Jelaskan
28 Berapa Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha dalam 2 tahun terakhir?	a. Jumlah pelatihan/advokasi oleh Lembaga Masyarakat adalah (sebutkan jumlahnya) pelatihan/advokasi, yang terdiri dari 1. Nama LM dan jenis pelatihan: 2. Nama LM dan Jenis Pelatihan: 3. Nama LM dan jenis pelatihan: 4. Nama LM dan jenis pelatihan:

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>29 Berapa Jumlah Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender dalam 2 tahun terakhir?</p>	<p>b. Pelatihan/advokasi oleh Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama PT dan jenis pelatihan: 2. Nama RT dan jenis pelatihan: 3. Nama PT dan jenis pelatihan: 4. Nama PT dan jenis pelatihan: <p>c. Pelatihan/advoksi oleh Dunia Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan dan jenis pelatihan: 2. Nama Perusahaan dan jenis pelatihan: 3. Nama Perusahaan dan jenis pelatihan: <p>d. Tidak ada</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah LM/PT/Dunia Usaha yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender LM, PT dan Perusahaan yang terdiri dari b. Kegiatan Lembaga Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama LM dan bentuk kegiatan 2. Nama LM dan bentuk kegiatan 3. Nama LM dan bentuk kegiatan 4. Nama LM dan bentuk kegiatan c. Kegiatan PT <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama PT dan bentuk kegiatan: 2. Nama PT dan bentuk kegiatan: 3. Nama PT dan bentuk kegiatan:

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>30 Berapa jumlah Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan anak</p>	<p>4. Nama PT dan bentuk kegiatan:</p> <p>d. Kegiatan Dunia Usaha</p> <p>1. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan</p> <p>2. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan</p> <p>3. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan</p> <p>4. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan</p> <p>e. Tidak ada yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender</p> <p>a. Lembaga Masyarakat mempunyai pelayanan. Bentuk pelayanannya</p> <p>1. Pelayanan.....</p> <p>2. Pelayanan.....</p> <p>3. Pelayanan.....</p> <p>4. Pelayanan.....</p> <p>b. Perguruan Tinggi mempunyai pelayanan. Bentuknya:</p> <p>1. Pelayanan.....</p> <p>2. Pelayanan.....</p> <p>3. Pelayanan.....</p> <p>4. Pelayanan.....</p> <p>c. Perusahaan mempunyai pelayanan. Bentuknya</p> <p>1. Pelayanan.....</p> <p>2. Pelayanan.....</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	3. Pelayanan..... 4. Pelayanan..... 5. Pelayanan.....
Nama Ibukota Kabupaten/Kota
Tanggal pengisian (Tgl/bulan/Tahun)
Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota
Tanda tangan dan stempel

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PENJELASAN TENTANG PENGISIAN FORMULIR

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk melihat status Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Informasi yang dikumpulkan akan dapat digunakan untuk penilaian kinerja, merencanakan peningkatan pelaksanaan PUG, menghitung kebutuhan sumber daya, sebagai informasi dasar untuk pengembangan program yang lebih luas dan keperluan lainnya. Karena akan digunakan untuk berbagai keperluan, maka kebenaran informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan benar, agar pemanfaatannya menjadi maksimal dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan dan hasilnya.

I. KETENTUAN UMUM

Pengisian formulir ini melibatkan seluruh OPD Kabupaten/Kota.

Dalam melengkapi formulir pemantauan dan evaluasi ini diperlukan kelengkapan dokumen seperti:

1. Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PUG dan PPRG, termasuk Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota;
2. Semua kebijakan dalam bentuk Pedoman, Juklak, Juknis dan lainnya terkait dengan PUG dan PPRG yang telah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota; dan
3. Dokumen perencanaan dan penganggaran berupa RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD, KUA/PPAS, RKA OPD dan DPA OPD.

Pada umumnya jawaban dari pertanyaan adalah memilih salah satu pilihan jawaban. Jika pada jawaban yang dipilih diminta untuk memberikan penjelasan, mohon agar dituliskan jawabannya. Untuk Jawaban yang pilihannya dapat lebih dari 1 jawaban, akan diberi keterangan pada pertanyaan tersebut.

II. PENGISIAN FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Formulir Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG ini di bagi ke dalam dua bagian besar yaitu;

1. Bagian A khusus berkaitan dengan indikator kelembagaan PUG dari 7 prasyarat PUG; dan
2. Bagian B khusus berkaitan dengan pelaksanaan PUG.

Penjelasan yang akan diuraikan di bawah ini adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau memungkinkan untuk salah tafsir, sedangkan pertanyaan yang mudah tidak akan diuraikan.

A. INDIKATOR KELEMBAGAAN, 7 PRA-SYARAT PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

1. KOMITMEN

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan “kebijakan“ ini adalah aturan tertulis yang bersifat mengatur (*regelling*) dan mengikat yang dikeluarkan oleh

Pemda Kabupaten/Kota berkaitan khusus tentang pelaksanaan strategi PUG di Kabupaten/Kota Saudara seperti Perda, Perbup/Walkot atau lainnya.

Pertanyaan Nomor 2 – 3 jelas

Pertanyaan Nomor 4

Yang dimaksud kebijakan teknis operasional adalah aturan atau petunjuk teknis sebagai upaya tindak lanjut dari kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan nomor 1 diatas yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota.

Pertanyaan Nomor 5 – 7 jelas

Pertanyaan Nomor 8

Yang dimaksud dengan Rencana Pencapaian PUG adalah rencana kegiatan untuk pencapaian PUG di Kabupaten/Kota untuk selama minimal 3 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, atau Sekretaris daerah atau Kepala Bappeda. Di daerah namanya dapat berbeda, maka didalam pertanyaan no 8 ini diberikan pilihan yang paling cocok dengan yang dipunyai daerah, kalau tidak ada yang sesuai, silakan tulis dalam kolom jawaban lain-lain.

2. KEBIJAKAN

Dokumen Perencanaan

Pertanyaan Nomor 9

Dokumen RPJMD/RKPD dikatakan responsif gender manakala memuat: Acuan hukum berkaitan dengan PUG, Data terpilah, adanya isu-isu gender dan anak, visi dan misinya baik tersurat maupun tersirat atau tidak langsung, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, dan indikator gender. Saudara diberikan pilihan untuk mengisi yang memang ada dalam RPJMD/RKPD. Pertanyaan nomor 9 ini ingin mencari informasi tentang hal itu.

Pertanyaan Nomor 10

Pertanyaan ini khusus untuk diisi oleh Dinas PPPA/KB atau sejenisnya dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada penjelasan nomor 9.

Pertanyaan Nomor 11

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa Renstra masing-masing OPD yang sudah memenuhi ke 4-5 kriteria perencanaan responsif gender sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan nomor 10 diatas.

Dokumen Anggaran

Pertanyaan Nomor 12

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan KUA/PPAS untuk acuan dalam menyusun RKA-OPD tahun mendatang, apakah dalam KUA/PPAS tersebut telah mengakomodasikan isu gender dan anak di dalamnya, dalam kolom jawaban hanya mencantumkan “sudah ada”, mohon diberi penjelasan, atau “belum ada” juga berikan penjelasan.

Pertanyaan Nomor 13

Hal yang sama pada setiap Daerah pada persiapan tahun mendatang dalam penyusunan RKA-OPD selalu dikeluarkan “Pedoman atau petunjuk penyusunan dan Penelaahan RKA-OPD”, apakah dalam pedoman tersebut sudah diatur tentang penyusunan Anggaran Responsif Gender atau dalam bentuk lainnya seperti SE Bupati/Walikota, Sekda atau Bappeda.

3. KELEMBAGAAN

Pertanyaan Nomor 14

Yang dimaksud unit kerja yang menangani PUG adalah unit eselon yang menangani langsung pelaksanaan PUG di bawah Dinas PPPA/KB atau sejenisnya, bisa eselon 3, atau eselon 4 dan bahkan non-eselon, dalam kolom jawaban ada pilihan yang paling tepat untuk Kabupaten/Kota Saudara.

Pertanyaan Nomor 15-16 jelas

Pertanyaan Nomor 17

Yang dimaksud Tim Teknis sebagaimana dalam pertanyaan nomor 17 ini adalah tim teknis sesuai dengan Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pertanyaan Nomor 18

Yang dimaksud lembaga “*drivers*” atau lembaga penggerak PUG di Kabupaten dan Kota yaitu Bappeda, BPPPA/KB, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat. Yang dimaksud dalam pertanyaan nomor 17, Saudara diminta untuk menjelaskan peran masing-masing lembaga tsb. dalam mendorong PUG di Kabupaten/Kota (lihat kolom jawaban).

Pertanyaan Nomor 19 jelas

4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber Daya manusia

Pertanyaan Nomor 20

Yang dimaksud perencana di sini adalah perencana di masing-masing OPD yang telah mengikuti pelatihan PPRG baik yang mendapatkan sertifikat atau pun tidak, yang dilaksanakan oleh KPPPA, PSW/PT atau Pemda Propinsi.

Pertanyaan Nomor 21

Yang dimaksud auditor terlatih di sini adalah auditor di Inspektorat Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan PPRG dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

Pertanyaan Nomor 22

Yang dimaksud fasilitator di sini adalah Fasilitator yang dimiliki Kabupaten/Kota baik berasal dari OPD Kabupaten/Kota, PSW/G,

maupun dari Lembaga Masyarakat, yang telah mengikuti pelatihan TOT PPRG yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA atau Pemda Propinsi.

Pertanyaan Nomor 23

Yang dimaksud "*Champion Gender*" disini adalah seseorang apakah dia itu pejabat atau istri pejabat di Kabupaten/Kota, Aktivis LM, PSW/G yang selalu *concern* atau memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan PUG dan pencapaian kesetaraan gender di daerah itu.

Anggaran daerah

Pertanyaan Nomor 24-27

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 24-27 adalah jumlah dana yang tersedia pada Bappeda, DPPPA atau sejenisnya, Badan/Dinas Keuangan, dan Inspektorat yang digunakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota contoh: Bappeda punya kegiatan untuk *Capacity Building* PPRG bagi internal Bappeda, Inspektorat ada kegiatan untuk audit PPRG dstnya.

Pertanyaan Nomor 28

Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 28 adalah OPD di luar lembaga yang disebutkan dalam nomor 24-27 di atas, yang sudah memiliki alokasi dana untuk pelaksanaan PUG/PPRG di lingkungan OPDnya. Contoh: Dinas pendidikan Kabupaten telah mempunyai dana untuk melakukan pelatihan PPRG bagi Perencana di lingkungan Dinas pendidikan dan lain-lain.

5. DATA, SISTIM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI

Pertanyaan Nomor 29-33 jelas.

Pertanyaan Nomor 34

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 34 adalah dimana data terpilih tersebut sudah diresmikan atau dikukuhkan dengan SK dan masuk dalam sistim data daerah.

Pertanyaan Nomor 35 jelas

Pertanyaan Nomor 36

Yang dimaksud dengan bahan Informasi dalam promosi PUG bisa dalam bentuk buku laporan pelaksanaan PUG di daerah yang diterbitkan oleh daerah, atau mungkin buku-buku seperti “Buku Saku PPRG”, bahan informasi berbentuk elektronik, dan lain-lain seperti tercantum dalam kolom jawaban pertanyaan nomor 36.

Pertanyaan Nomor 37 jelas

6. METODE DAN TOOL

Pertanyaan Nomor 38-41 jelas.

7. PERANSERTA MASYARAKAT

Pertanyaan Nomor 42 jelas

Pertanyaan Nomor 43

Yang dimaksud dengan Forum koordinasi adalah Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat (PUSPA adalah singkatan dari Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak) yang sudah terbentuk di Kabupaten/Kota.

Pertanyaan 44-45 jelas

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PUG

1. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan Kabupaten/Kota

Pertanyaan Nomor 1

Yang dimaksud dengan kebijakan responsif gender pada pertanyaan ini adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan usaha penyelesaian isu-isu

gender dan anak di Kabupaten/Kota itu selain kebijakan PUG. Kebijakan itu bisa dalam bentuk Perda, PerBup/Walkot, atau mungkin Sekda atau kepala Bappeda, seperti Perda tentang perlindungan anak, PerBup/Walkot tentang TPPO, Perda tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan, SE tentang gugus tugas trafiking dan lain-lain.

Pertanyaan Nomor 2-3, cukup jelas.

Pertanyaan Nomor 4, cukup jelas

Program

Pertanyaan Nomor 5

Yang dimaksud program responsif gender pada pertanyaan ini adalah program-program yang memang langsung atau tidak langsung mampu menyelesaikan kesenjangan gender dan isu anak. Contoh program bantuan beasiswa berprestasi, dan lain-lain.

Pertanyaan Nomor 6

Yang dimaksud program inovasi adalah program-program yang disebutkan dalam nomor 4 yang sifatnya inovatif atau sebagai terobosan yang memang dibuat untuk menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan anak di daerah itu contoh, Program Peningkatan Usaha Ekonomi bagi perempuan pedesaan, dan lain-lain.

Kegiatan

Pertanyaan Nomor 7

Yang dimaksud kegiatan responsif gender pada pertanyaan ini adalah:

- a. Kegiatan responsif gender melalui proses GAP dan GBS adalah kegiatan yang penyusunannya telah dilakukan melalui analisis gender dengan metode GAP atau lainnya, dan-penyusunan GBS;
- b. Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam poin b masing-masing dilampiri GBS nya.

Pertanyaan Nomor 8, jelas.

Pertanyaan nomor 9.

Adalah kegiatan yang mengakomodasikan kesenjangan gender atau menyelesaikan masalah gender yang penyusunannya tidak atau belum melalui proses PUG/PPRG/ARG, namun diterbitkan karena perhatian dari Pemda, Kepala Daerah, atau inisiatif DPRD atau merupakan perluasan atau terjemahan dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pada tingkat Nasional.

2. KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN

Pertanyaan Nomor 10

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 10 ini adalah Propinsi atau Kabupaten/Kota lain di luar Kabupaten/Kota Saudara, yang telah atau sedang melakukan kunjungan studi banding, ikut pelatihan PPRG, dan lain-lain dengan maksud untuk belajar dan berbagi pengalaman kegiatan PPRG di Kabupaten/Kota Saudara.

Pertanyaan Nomor 11 jelas.

Pertanyaan Nomor 12

Yang dimaksud dengan pertanyaan Nomor 12 ini adalah jumlah tenaga pelayanan medis, konselor, pendamping hukum dan pelayanan lainnya yang tersedia dan siap melayani korban di tempat-tempat pelayanan seperti P2TP2A, UPT, Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Puskesmas dan tempat-tempat lainnya sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Jika ada fungsi yang dirangkap, maka dianggap hanya 1 tenaga saja di salah satu jenis tenaga pelayanan.

Pertanyaan Nomor 13

Jumlah kasus yang melapor ke unit-unit pelayanan dalam 12 bulan terakhir.

Pertanyaan Nomor 14

Adalah persentase jumlah tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor dalam 12 bulan terakhir (jawaban Nomor 12e dibagi dengan jawaban Nomor 13 (jumlah korban yang melapor dan tercatat).

Pertanyaan Nomor 15 jelas

Pertanyaan Nomor 16

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 16 ini, berkaitan dengan usaha Dinas PPPA Kabupaten/kota atau sejenisnya yang mempunyai kegiatan dalam perluasan jangkauan pelaksanaan PUG/PPRG pada tingkat desa sehubungan dengan adanya Undang-undang tentang desa.

3. ANGGARAN

Pertanyaan Nomor 17

Yang dimaksud pertanyaan nomor 17 ini adalah anggaran yang ada pada pemerintah Kabupaten/Kota TA 2017 yang memang langsung ataupun tidak langsung ditujukan untuk menyelesaikan atau menurunkan masalah kesenjangan gender di Kabupaten/Kota saudara dengan dana APBD. Anggaran ini bisa bersifat anggaran untuk spesifik perempuan atau laki-laki, anggaran untuk *capacity building*, dan anggaran kesetaraan gender. Mungkin sebagian sudah di lakukan melalui proses PPRG, ARG, namun sebagian besar belum, silakan untuk disebutkan dalam kolom jawaban.

Pertanyaan Nomor 18, jelas.

Pertanyaan Nomor 19.

Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah apakah Bupati atau Walikota membuat kebijakan atau ketentuan tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Desa atau Kelurahan.

4. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING

Pertanyaan Nomor 20

Kegiatan Sinergis adalah kegiatan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan melibatkan lebih dari 1

Lembaga Masyarakat dan menggunakan kemampuan masing-masing Lembaga Masyarakat yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.

Pertanyaan Nomor 21

Yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 21 adalah keterlibatan PSW/LM dan dunia usaha dalam berbagai program dan kegiatan responsif gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauannya.

Pertanyaan Nomor 22

Yang dimaksud kajian dalam pertanyaan nomor 22 ini adalah kajian yang berkaitan dengan isu gender dalam pembangunan baik yang dilakukan PSW/LM atau pun dunia usaha sendiri, atau dalam rangka kerjasama Pemda dengan PSW/LM/Dunia usaha.

Pertanyaan nomor 23, cukup jelas

Pertanyaan nomor 24

Yang dimaksud adalah pelatihan/advokasi PPRG yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia usaha dengan fasilitator dan anggaran sendiri, baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk pihak lain.

Pertanyaan Nomor 25

Yang dimaksud pertanyaan Nomor 25 adalah jumlah PSW atau Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha yang sudah memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender secara mandiri (dengan anggaran sendiri).

Pertanyaan Nomor 26

Yang dimaksud dengan pelayanan adalah pelayanan untuk masyarakat atau pekerja/pegawai pada perusahaan yang dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari program Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi atau Perusahaan.

**FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

IDENTITAS KABUPATEN/KOTA

1. Nama Kabupaten/Kota	:	
2. Nama Dinas yang menangani PPPA	:	
3. Nama Kepala Dinas	:	
4. Alamat	:	
5. Telepon/Fax/E-mail	:	
6. Nama dan telepon kontak person	:	

A. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG DI KABUPATEN/KOTA

PERTANYAAN		JAWABAN
1. KOMITMEN		
Kebijakan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)		
1	Apakah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender?	<p>a. Ya. Berikutnya:</p> <p>1. Perda Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>2. Peraturan Bupati/Walikota Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>3. Lainnya: Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>b. Tidak atau belum memiliki. Mengapa? Jelaskan.....</p>
2	Apakah Peraturan yang disebutkan dalam pertanyaan 1 diatas sudah di sosialisasi/advokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)	<p>a. Sudah, kepada:</p> <p>1. Para Kepala OPD</p> <p>2. Anggota DPRD</p> <p>3. Lembaga Masyarakat(LM), Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender(PSW/G) dan Dunia Usaha/swasta</p> <p>4. Aparat Penegak hukum</p> <p>5. Lembaga Bantuan Hukum</p> <p>b. Belum disosialisasikan. Mengapa? Jelaskan</p>
3	Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan/	<p>a. Khusus kepada OPD melalui Surat Edaran (nama</p>

	<p>diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>jabatan) Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>b. Melalui Media Massa (jelaskan)</p> <p>c. Melalui Forum (sebutkan forum apa)</p> <p>d. Seminar/workshop (sebutkan)</p> <p>e. Lainnya, sebutkan.</p>
<p>Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah</p>		
<p>4</p>	<p>Apakah di Kabupaten/Kota Saudara sudah ada kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota tentang PUG ?</p>	<p>a. Ada. Yaitu: 1. SK Bupati/Walikota Nomor : tentang (lampirkan)</p>

		<p>2. SE Bupati/Walikota Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>3. SE Sekda Kabupaten/Kota Nomor : tentang (lampirkan)</p> <p>4. Lain-lain Sebutkan :</p> <p>b. Tidak/belum ada. Mengapa? Jelaskan</p>
<p>5</p>	<p>Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan No. 4 diatas sudah di sosialisasi/diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Sudah, kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para kepala OPD; 2. Anggota DPRD; 3. LM, PSW/G dan dunia usaha/swasta; 4. Aparat Penegak hukum; 5. Lembaga Bantuan Hukum; <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>

6	<p>Bagaimana Peraturan tersebut disosialisasikan/diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>.....</p> <p>a. Dilakukan melalui:</p> <p>1. Pelatihan PPRG;</p> <p>2. Bimbingan teknis;</p> <p>3. Advokasi dan sosialisasi</p> <p>4. Lainnya, Sebutkan</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>b. Belum disosialisasikan. Mengapa? Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7	<p>Berapa jumlah OPD yang telah mendapat sosialisasi tentang kebijakan teknis operasional PPRG di Kabupaten/Kota</p>	<p>a. OPD</p> <p>b. % dari semua OPD</p>
<p>Rencana pencapaian PUG di Kabupaten/Kota</p>		
8	<p>Apakah Kabupaten/Kota sudah mempunyai rencana pencapaian PUG Kabupaten/Kota yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA?</p>	<p>a. Ya, sudah, namanya</p> <p>1. Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten/Kota:</p> <p>2. Rencana Kerja POKJA PUG Kabupaten/Kota;</p>

	<p>Apa nama rencana tersebut?</p>	<p>3. Roadmap/Peta jalan PUG Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Lainnya; Sebutkan</p> <p>b. Belum ada. Mengapa? Jelaskan ;</p>
<p>2. KEBIJAKAN</p>		
<p>Dokumen perencanaan</p>		
<p>9</p>	<p>Apakah dokumen RPJMD/RKPD telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender sebagai berikut? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan; Sebutkan</p> <p>b. Datanya terilah berdasarkan jenis kelamin Bagian mana</p>

	c. Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah Jelaskan
	d. Masukkan dalam Visi dan Misi Jelaskan
	e. Masukkan ke dalam Program dan kegiatan Sebutkan
	f. Masukkan indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan Jelaskan
	g. Masukkan kesetaraan gender belum masuk di dalam

10	<p>Apakah dokumen Renstra Dinas PPPA atau sejenisnya telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender sebagai berikut? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>RPJMD/RKPD</p> <p>a. Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan Sebutkan</p> <p>b. Datanya terpilih berdasarkan jenis kelamin Di bagian mana?</p> <p>c. Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah Jelaskan</p> <p>d. Masuk ke dalam Program dan kegiatan Sebutkan</p>
----	---	---

		<p>e. Indikator pencapaian kinerja urusan wajib pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari indikator keberhasilan. Jelaskan</p>
11	<p>Berapa jumlah Renstra OPD yang menurut penilaian Saudara sudah responsif gender (dimilai dengan menggunakan kriteria seperti pada pertanyaan nomor 10)</p>	<p>f. Belum masuk di dalam Renstra a. Jumlah Renstra OPD yang responsive gender adalah</p> <p>b.% dari semua Renstra OPD (Lampirkan bagian dari dokumen yang terkait)</p>
<p>Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)</p>		
12	<p>Apakah isu gender dan anak sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS</p>	<p>a. Sudah, pada bagian Lampirkan</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>

13	<p>Apakah dalam Pedoman penyusunan dan Penelaahan RKA-OPD sudah diakomodasikan proses penyusunan ARG di masing-masing OPD</p>	<p>a. Sudah dicantumkan pada bagian (Lampirkan bagian yang memuatnya)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>1. Diatur dalam bentuk lain Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. Diatur dalam bentuk lain Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Belum, mengapa? Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3. KELEMBAGAAN		
14	<p>Sebutkan nama unit kerja yang menangani PUG di bawah Dinas PPPA?</p>	<p>a. Eselon 3, (sebutkan); Bidang</p>

		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Eselon 4, (sebutkan Subidang</p> <p>.....</p> <p>c. Non Eselon dibawah Bidang Mengapa? Jelaskan</p> <p>.....</p>
<p>15</p>	<p>Apakah ada Kelompok Kerja PUG di Kabupaten/Kota? Jika ada, ditetapkan dengan</p>	<p>a. Ada, ditetapkan dengan:</p> <p>1. Keputusan Gubernur Nomor :tentang (lampirkan)</p> <p>2. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :tentang (lampirkan)</p> <p>3. Keputusan Kepala Bappeda Nomor :tentang (lampirkan)</p> <p>4. Keputusan Kepala Dinas PPPA Nomor :tentang (lampirkan)</p> <p>b. Belum ditetapkan atau belum ada Pokja. Mengapa?</p>

		<p>Jelaskan</p>
<p>16</p>	<p>Berapa jumlah OPD yang terwakili dalam POKJA PUG ? Bila jawaban pertanyaan no 15 ada</p>	<p>a. Jumlah OPD yang terwakili di Pokja PUG.....OPD b. % dari semua OPD c. Belum ada POKJA PUG</p>
<p>17</p>	<p>Apakah sudah ada Tim Teknis PUG di Provinsi</p>	<p>a. Sudah ada. Ditetapkan dengan SK Nomor : tentang (lampirkan) b. Belum ada, Mengapa? Jelaskan</p>
<p>18</p>	<p>Apakah lembaga penggerak (“drivers”) sudah berperan dalam pokja? Jelaskan peran masing-masing?</p>	<p>a. Sudah. 1. BAPPEDA Berperan sebagai: 2. DPPPA/KB atau sejenisnya berperan sebagai: 3. Dinas keuangan daerah atau sejenisnya Berperan sebagai:</p>

	<p>.....</p> <p>4. Inspektorat Daerah berperan sebagai: </p> <p>b. Belum ada yang berperan</p>
19	<p>Apakah OPD-OPD sudah mempunyai focal point?</p> <p>a. Sudah, jumlah OPD yang mempunyai focal point berjumlah</p> <p>Lampirkan Surat Keputusannya</p> <p>b. % dari semua OPD</p> <p>c. Belum ada OPD yang mempunyai Focal Point</p>
<p>4. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN</p>	
<p>Sumberdaya Manusia</p>	
20	<p>Apakah masing-masing OPD sudah mempunyai perencanaan yang terlatih untuk melaksanakan PPRG di masing-masing OPDnya</p> <p>a. Sudah.</p> <p>1. Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang sudah dilatih PPRG dan sudah mendapatkan sertifikatOPD</p> <p>2. Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang sudah dilatih namun belum mendapatkan sertifikat OPD</p> <p>3. Jumlah OPD yang mempunyai perencanaan yang terlatih (no 1+ no 2) OPD</p> <p>4. % dari semua OPD (no. 3 dibagi jumlah semua OPD)</p>

		<p>b. Belum ada OPD yang memiliki. Mengapa? Jelaskan </p>
<p>21</p>	<p>Apakah Inspektorat sudah mempunyai SDM yang sudah terlatih PUG?</p>	<p>a. Sudah. 1. Inspektur pembantu orang 2. AuditorOrang b. Belum ada. Mengapa? Jelaskan </p>
<p>22</p>	<p>Apakah Kabupaten/Kota mempunyai fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator?</p>	<p>a. Ya. Mempunyai (Lampirkan sertifikatnya) 1. Yang berasal dari Dinas PPPA orang 2. Yang berasal OPD lain orang 3. Yang berasal dari PT/Univ orang 4. Yang berasal dari Lembaga Masyarakat orang 5. Jumlah seluruh fasilitator orang 6.% terhadap jumlah semua OPD di Kab/Kota</p>

23	Berapa Jumlah Gender Champion di Kabupaten/Kota Saudara dalam 2 tahun terakhir ini?	<p>b. Belum mempunyai fasilitator</p> <p>a. orang</p> <p>b. tidak ada Jelaskan</p>
Anggaran daerah untuk kelembagaan PUG		
24	Berapa alokasi anggaran Dinas PPPA atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG?	<p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggaran Dinas PPPA/KB atau sejenisnya (diluar anggaran sekretariat)</p> <p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
25	Berapa alokasi anggaran di Bappeda untuk fasilitasi PUG?	<p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggaran BAPPEDA (diluar anggaran sekretariat)</p> <p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>

26	Berapa alokasi anggaran Biro/Badan/Dinas Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitas PUG?	<p>.....</p> <p>a. Rp.....</p> <p>b.% terhadap anggaran Dinas Keuangan daerah atau sejenisnya (diluar anggaran sekretariat)</p> <p>c. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
27	Berapa alokasi anggaran di Inspektorat Kabupaten/Kota untuk Fasilitas PUG?	<p>d. Rp.....</p> <p>e.% terhadap anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota (diluar anggaran sekretariat)</p> <p>f. Tidak ada. Mengapa? Jelaskan</p>
28	Berapa jumlah OPD (diluar lembaga drivers) Kabupaten/Kota yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelemagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll.)	<p>b. JumlahOPD, yaitu:</p> <p>1. OPD</p> <p>Jumlah Anggaran : Rp</p> <p>2. OPD</p>

..... Jumlah Anggaran : Rp	
3. OPD Jumlah Anggaran : Rp	
4. OPD Jumlah Anggaran : Rp	
5. OPD Jumlah Anggaran : Rp	
6. OPD Jumlah Anggaran : Rp	
7. OPD Jumlah Anggaran : Rp	
8. OPD Jumlah Anggaran : Rp	
9. OPD	

		<p>..... Jumlah Anggaran : Rp 10.OPD Jumlah Anggaran : Rp 11.OPD Jumlah Anggaran : Rp c. Tidak ada</p>
5. DATA, SISTEM INFORMASI DAN BAHAN INFORMASI		
29	Apakah sudah terbentuk Forum Data lintas OPD?	<p>a. Sudah.</p> <p>1. Apakah namanya? Sebutkan dan SK pembentukannya</p> <p>Forum data Surat Keputusan (SK) Nomor (nama jabatan) (nama jabatan) Nomor </p> <p>2. Berapa OPD yang termasuk dalam forum data? OPD</p>

30	<p>Apakah ada lembaga di luar OPD yang menjadi anggota Forum Data tersebut?</p>	<p>b. Belum terbentuk</p> <p>a. Ada, yaitu:</p> <p>1. Lembaga</p> <p>2. Lembaga</p> <p>3. Lembaga</p> <p>4. Lembaga</p> <p>5. Lembaga</p> <p>b. Tidak ada Jelaskan</p>
31	<p>Apakah Statistik/ Profil gender Kabupaten/Kota sudah ada?</p>	<p>a. Sudah. (sebutkan namanya dan lampirkan Cover bukunya)</p>

		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Belum, mengapa? Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
32	<p>Apakah “Daerah Dalam Angka”, datanya sudah terpilah menurut jenis kelamin?</p>	<p>a. Sudah. Berikan contohnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
33	<p>Berapa jumlah OPD yang telah mempunyai Data terpilah ?</p>	<p>a. OPD</p> <p>b. % dari semua OPD</p> <p>c. Belum ada. Mengapa? Jelaskan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

34	Apakah data terpilih sudah menjadi bagian dari sistem data Kab/Kota?	<p>.....</p> <p>a. Sudah. Ditetapkan dengan SK (nama jabatan) Nomor..... (nama jabatan) Nomor.....</p> <p>b. Sudah, tetapi belum ditetapkan dengan SK</p> <p>c. Belum Ada Jelaskan </p>
35	Apakah data dan statistik gender sudah dapat diakses melalui <i>Website</i> Pemda?	<p>a. Sudah, Pada bagian dari <i>website</i> (lampirkan foto halaman <i>Website</i>)</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan </p>
36	Dalam rangka promosi pelaksanaan PUG/PPRG, apakah Kabupaten/Kota mempunyai bahan informasi	<p>a. Ya. Mempunyai dalam bentuk: 1. Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan</p>

	<p>yang digunakan di Kabupaten/Kota? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>2. Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah ;</p> <p>3. Bahan KIE utk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur</p> <p>4. Media massa elektronik</p> <p>5. Media massa cetak</p> <p>6. Media sosial</p>
37	<p>Siapa sasaran Promosi PUG/PPRG sebagaimana disebutkan dalam nomor 36 diatas ? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>b. Tidak mempunyai</p> <p>a. Anggota DPRD</p> <p>b. Pimpinan OPD</p> <p>c. Para Perencana di OPD</p> <p>d. Lembaga Masyarakat, PT dan Dunia Usaha.</p> <p>e. Masyarakat umum</p> <p>f. Lain-lain (sebutkan)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>6. METODE DAN TOOL</p>		
38	<p>Apakah Kabupaten/Kota Saudara menerbitkan Pedoman Teknis pelaksanaan PUG/PPRG ?</p>	<p>a. Ya, judulnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

		<p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
39	<p>Apakah ada Modul Pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan Kabupaten/Kota?</p>	<p>a. Ada (sebutkan judulnya) 1. Disusun oleh Kab/Kota sendiri 2. Menerbitkan kembali modul yang disusun pihak lain</p>
40	<p>Metode analisis gender apa yang diperkenalkan oleh Dinas PPPA Kab/Kota untuk digunakan?</p>	<p>b. Belum ada Jelaskan a. Gender <i>Analysis Pathway</i> untuk menganalisis b. <i>PROBA (Problem-based Analysis)</i> untuk menganalisis.....</p>

		<p>c. SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>)</p> <p>d. Lainnya, sebutkan!</p> <p>e. Belum ada Jelaskan</p>
41	Apakah Kabupaten/Kota Saudara telah menerbitkan Pedoman Audit yang responsif gender?	<p>a. Sudah, sebutkan judulnya</p> <p>b. Belum. Mengapa? Jelaskan</p>
7. PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA		

42	<p>Apakah Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha termasuk dalam Pokja PUG?</p>	<p>a. Ya. Jumlah Lembaga Masyarakat yang terlibat, adalah.....yang terdiri dari:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5. Dst</p> <p>b. Jumlah Perguruan Tinggi/Akademisi yang terlibat yang terdiri dari:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>
----	--	--

	5.
	6.
	7. Dst.
	c. Jumlah Perusahaan/Dunia Usaha yang terlibat adalah (sebutkan) :
	1.
	2.
	3.
	4.
	5. Dst
	d. Belum atau tidak melibatkan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Pokja PUG
43	Apakah sudah ada Forum Koordinasi Lembaga a. Sudah ada, disahkan dengan S.K.

	Masyarakat (PUSPA) yang di sahkan?	<p>..... (nama jabatan) Nomor (nama jabatan) Nomor </p> <p>b. Jumlah lembaga yang berada dalam forum adalah lembaga</p> <p>c. Belum ada Forum Puspa, Mengapa? Jelaskan </p>
44	Kegiatan apa yang melibatkan Lembaga Masyarakat, PSW/G, dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender?	<p>a. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender dan anak </p> <p>b. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan </p> <p>c. Pelaksanaan program dan kegiatan </p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan </p> <p>e. Layanan masyarakat TKA/TKP/TPPO </p> <p>f. Lainnya, sebutkan! </p> <p>g. Belum melibatkan </p>

45	Berapa jumlah dan nama dari LM, PT dan Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG dan PP?	<p>a. Lembaga Masyarakat, jumlah yang terlibat.....</p> <p>yaitu:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p>
----	---	--

	10.
	11.
	b. Perguruan Tinggi, Akademisi Jumlah yang terlibat....., yaitu:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	c. Perusahaan/Dunia Usaha Jumlah yang

terlibat....., yaitu:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PUG DI DAERAH

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>5. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</p>	
<p>Kebijakan Kabupaten/Kota</p>	
<p>1 Apakah ada Kebijakan Kabupaten/Kota yang responsif gender yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir?</p>	<p>a. Ada.</p> <p>Peraturan Daerah (sebutkan):</p> <p>1. Perda nomor.....tentang</p> <p>2. Perda nomor..... tentang</p> <p>3. Perda nomor..... tentang</p> <p>Peraturan Kepala Daerah (sebutkan):</p> <p>1. Nomor..... tentang</p> <p>2. Nomor..... tentang</p> <p>3. Nomor..... tentang</p> <p>4. Nomor..... tentang</p> <p>Bentuk lainnya (selain Perda, dan Perbup/Walkot), sebutkan</p> <p>1. Nomor..... tentang</p> <p>2. Nomor..... tentang</p> <p>3. Nomor..... tentang</p> <p>4. Nomor..... tentang</p> <p>b. Tidak ada</p>
<p>2 Apakah Peraturan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan 1 diatas</p>	<p>a. Sudah</p> <p>1. Anggota DPRD</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>sudah di sosialisasikan/ diadvokasikan? Jika sudah, kepada siapa? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala OPD 3. LM, PSW/G, Dunia Usaha/swasta 4. Aparat Penegak hukum 5. Lembaga bantuan hukum 6. Lain-lain (sebutkan) <p>b. Belum</p>
<p>3. Bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan/ diadvokasikan? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Surat Edaran (SE), Sebutkan SE nya b. Melalui Media Massa Jelaskan c. Melalui Forum-forum (sebutkan jenis forum tsb) <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. d. Lain-lain (sebutkan)
<p>4. Apakah peraturan pada butir 1 sudah dijadikan acuan bagi OPD dalam melaksanakan tupoksinya</p>	<p>a. Sudah. Pada % OPD, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas 2. Dinas

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>3. Dinas</p> <p>4. Dinas</p> <p>b. Belum ada. Jelaskan</p>
<p>Program</p> <p>5. Apakah Kabupaten/Kota mempunyai program atau kegiatan yang responsif gender dalam 2 tahun terakhir? (sebutkan programnya)</p>	<p>a. Ya,</p> <p>1. Program</p> <p>2. Program</p> <p>3. Program</p> <p>4. Program</p> <p>5. Program</p> <p>6. Program</p> <p>7. Program</p>

	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>.....</p> <p>.....</p>
6	<p>Mana Program atau kegiatan di atas (pertanyaan no. 5) yang sifatnya inovatif</p>	<p>b. Persentase program RG terhadap keseluruhan program yang ada pada tahun berjalan%</p> <p>c. Belum ada program yang responsif gender</p> <p>a. Kegiatan inovatif:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>b. Tidak ada.</p>
7	<p>Apakah ada kegiatan di daerah yang responsif gender yang disusun dan dilaksanakan dengan proses PUG/PPRG dan dilaksanakan, dalam 2 tahun terakhir?</p>	<p>Kegiatan</p> <p>a. Ada. Sebutkan. (Lampirkan GBS dari kegiatan-kegiatan tersebut)</p> <p>1. Kegiatan</p> <p>2. Kegiatan</p> <p>3. Kegiatan</p>

	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>4. Kegiatan</p> <p>5. Kegiatan</p> <p>6. Kegiatan</p> <p>7. Kegiatan</p> <p>8. Kegiatan</p> <p>9. Kegiatan</p> <p>10. Kegiatan</p> <p>11. Kegiatan</p> <p>b. Tidak ada.</p>
8	Berapa jumlah OPD yang sudah	<p>a. Jumlah OPD yang sudah melaksanakan..... terdiri dari:</p>

JAWABAN	PERTANYAAN
<p>1. Dinas</p> <p>2. Dinas</p> <p>3. Dinas</p> <p>4. Dinas</p> <p>5. Dst...</p> <p>b. % dari seluruh OPD Kab/Kota</p>	<p>melaksanakan PPRG/ARG</p>
<p>a. Ada.</p> <p>1. Kegiatan</p> <p>2. Kegiatan</p> <p>3. Kegiatan</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>5. Kegiatan</p>	<p>9 Apakah ada kegiatan yang mengkomodasikan kesenjangan gender dan anak, namun penyusunannya TIDAK atau BELUM melalui PPRG dan ARG</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	b. Tidak ada
<p>2. KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN</p> <p>10. Apakah ada Daerah lain yang belajar PUG di Kabupaten/Kota Saudara dalam 2 tahun terakhir? (Jawaban dapat lebih dari 1 jawaban)</p>	<p>a. Ada. Sebutkan:</p> <p>1. Provinsi/Kab/Kota</p> <p>2. Provinsi/Kab/Kota</p> <p>3. Provinsi/Kab/Kota</p> <p>4. Provinsi/Kab/Kota</p> <p>5. Provinsi/Kab/Kota</p> <p>b. Tidak ada</p>
<p>11</p> <p>Apakah Kabupaten/Kota mempunyai Sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?</p>	<p>a. Ya, mempunyai</p> <p>1. Berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah</p> <p>2. Berbentuk P2TP2A, Jumlahnya</p> <p>3. Berbentuk <i>Women Crisis Center</i> atau sejenisnya, Jumlahnya</p> <p>4. Berbentuk Lembaga Advokasi Hukum, Jumlahnya</p> <p>5. Rumah Sakit, Jumlahnya</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>6. Puskesmas, Jumlahnya</p> <p>7. PPPA Polres, Jumlahnya</p> <p>8. Berbentuk lembaga lain, sebutkan nama</p> <p>.....</p> <p>Jumlahnya</p> <p>8. Berbentuk lembaga lain, sebutkan nama</p> <p>.....</p> <p>Jumlahnya</p> <p>b. Tidak mempunyai</p>

	PERTANYAAN	JAWABAN
12	Berapa jumlah tenaga pelayanan terlatih untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?	<p>a. Jumlah tenaga medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di Rumah Sakit tingkat Kabupaten orang 4. Di Puskesmas orang 5. Di tempat pelayanan lainnya orang <p>b. Jumlah tenaga konselor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di Rumah Sakit tingkat kabupatenorang 4. Di Puskesmas orang 5. Di tempat pelayanan lainnya orang <p>c. Jumlah tenaga pendamping hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTDorang 2. Di P2TP2A orang 3. Di fasilitas pelayanan lainnya orang <p>d. Jumlah tenaga pelayanan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di UPTD orang 2. Di P2TP2A orang 3. Di Rumah Sakit tingkat kabupaten orang 4. Di Puskesmas orang

PERTANYAAN		JAWABAN	
		5. Di tempat pelayanan lainnya orang	
13	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dalam 12 bulan terakhir	e. Jumlah seluruh petugas (medis, konselor, pendamping hukum, tenaga pelayanan lainnya) orang korban	
14	Persentase jumlah semua tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor (jawaban no. 11 e dibagi dengan jumlah yang melapor) % jumlah tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang tercatat melapor	
15	Berapa jumlah Kantor OPD yang mempunyai fasilitas untuk Ibu dan anak?	a. Penetapan/pengasuhan anak 1. Jumlah..... OPD 2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD b. Ruang menyusui 1. Jumlah OPD 2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD c. Tempat bermain anak 1. Jumlah OPD 2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD d. Fasilitas lainnya (sebutkan namanya) 1. Jumlahnya OPD 2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada di OPD e. Fasilitas lainnya (sebutkan namanya)	

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>.....</p> <p>1. Jumlahnya OPD</p> <p>2. Yang mempunyai tenaga pelayanan ada diOPD</p>
16 Apakah Dinas PPPA Kabupaten atau kota mempunyai kegiatan PUG atau Pemberdayaan Perempuan di Desa atau Kelurahan?	<p>a. Ya, bentuknya:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>b. Tidak/Belum ada kegiatan. Mengapa?</p>
3. ANGGARAN	
17 Berapa Total anggaran Pemda Kab/Kota yang responsif gender yang bersumber dari APBD tahun lalu	<p>a. Jumlah dalam Rp.....</p> <p>b. ...% dari anggaran Pembangunan</p>
18 Berapa jumlah anggaran non APBD Kab/Kota yang ditujukan untuk pemecahan masalah kesenjangan gender pada tahun lalu?	<p>a. Yang berasal dari Bantuan Luar Negeri: Rp.....</p> <p>b. Yang berasal dari Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha: Rp.....</p> <p>c. Yang berasal dari APBD Provinsi: Rp</p> <p>d. Yang berasal dari APBN: Rp</p> <p>e. Lain lain (sebutkan): Rp.</p>
19 Apakah Pemda kabupaten membuat	<p>a. Ya</p>

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>ketentuan tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>(lampirkan bagian yang mencantumkan ketentuan itu dan bagian dari lampiran itu yang mengatur pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)</p> <p>b. Tidak</p>
<p>4. PERANSERTA MASYARAKAT DAN JEJARING (NETWORKING)</p> <p>20 Berapa Kegiatan yang sifatnya sinergis yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama dengan lebih dari 1 Lembaga Masyarakat dan dengan tujuan yang sama untuk mengatasi masalah perempuan dan anak dalam 1 tahun terakhir.</p>	<p>a. kegiatan (sebutkan dan lampirkan dokumen pendukung)</p> <p>1. Kegiatan</p> <p>2. Kegiatan</p> <p>3. Kegiatan</p> <p>4. Kegiatan</p> <p>b. tidak ada</p>
<p>21 Berapa Jumlah program atau kegiatan pemberdayaan perempuan, PUG, Perlindungan perempuan dan anak yang melibatkan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia usaha dalam 2 tahun terakhir?</p>	<p>a. program, yaitu:</p> <p>1. Program/Kegiatan</p> <p>2. Program/Kegiatan</p> <p>3. Program/Kegiatan</p>

PERTANYAAN		JAWABAN	
		4. Program/Kegiatan b. tidak ada a. Jumlah kajian oleh Perguruan Tinggi Judul/Topik Yaitu 1. Judul: 2. Judul: 3. Judul: 4. Judul: 5. Judul: 6. Judul: b. Jumlah kajian oleh Lembaga Masyarakat Judul/topik. 1. Judul: 2. Judul:	
22	Berapa Jumlah kajian yang dilakukan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha tentang gender dalam pembangunan atau PUG dalam 4 tahun terakhir?		

PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>3. Judul:</p> <p>4. Judul:</p> <p>5. Judul:</p> <p>6. Judul:</p> <p>c. Jumlah kajian oleh Dunia Usaha Judul/Topik</p> <p>1. Judul:</p> <p>2. Judul:</p> <p>3. Judul:</p> <p>4. Judul:</p> <p>5. Judul:</p> <p>d. Tidak ada kajian</p> <p>a. Sudah (Jelaskan)</p>
23.	Apakah hasil kajian tersebut pada butir 21

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>sudah digunakan oleh Dinas PPPA KB atau sejenis untuk pengembangan kebijakan</p>	<p>..... b. Belum (Jelaskan) </p>
<p>24 Berapa Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha dalam 2 tahun terakhir?</p>	<p>a. Pelatihan/advokasi oleh Lembaga Masyarakat pelatihan/advokasi (sebutkan jumlahnya) 1. Nama LM dan jenis pelatihan: 2. Nama LM dan jenis pelatihan: 3. Nama LM dan jenis pelatihan: 4. Nama LM dan jenis pelatihan: b. Pelatihan/advokasi oleh Perguruan Tinggi 1. Nama PT dan jenis pelatihan: 2. Nama RT dan jenis pelatihan: 3. Nama PT dan jenis pelatihan: 4. Nama PT dan jenis pelatihan: c. Pelatihan/advoksi oleh Dunia Usaha 1. Nama Perusahaan dan jenis pelatihan: 2. Nama Perusahaan dan jenis pelatihan:</p>

PERTANYAAN		JAWABAN	
25	<p>Berapa Jumlah Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia usaha yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender dalam 2 tahun terakhir?</p>	<p>3. Nama Perusahaan dan jenis pelatihan:</p> <p>d. Tidak ada</p> <p>a. Jumlah LM/PT/Dunia Usaha yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsive gender LM, PT dan Perusahaan yang terdiri dari</p> <p>b. Kegiatan Lembaga Masyarakat</p> <p>1. Nama LM dan bentuk kegiatan</p> <p>2. Nama LM dan bentuk kegiatan</p> <p>3. Nama LM dan bentuk kegiatan</p> <p>4. Nama LM dan bentuk kegiatan</p> <p>c. Kegiatan PT</p> <p>1. Nama RT dan bentuk kegiatan:</p> <p>2. Nama RT dan bentuk kegiatan:</p> <p>3. Nama RT dan bentuk kegiatan:</p> <p>4. Nama RT dan bentuk kegiatan:</p> <p>a. Kegiatan Dunia Usaha</p> <p>1. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan:</p> <p>2. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan:</p> <p>3. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan:</p> <p>4. Nama Perusahaan dan bentuk kegiatan:</p> <p>5. Tidak ada yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender</p>	

PERTANYAAN	JAWABAN
<p>26 Berapa jumlah LM, PT dan Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan anak dan jenis pelayanannya</p>	<p>a. Lembaga Masyarakat mempunyai pelayanan. Bentuk pelayanannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan 2. Pelayanan 3. Pelayanan 4. Pelayanan <p>b. Perguruan Tinggi mempunyai pelayanan. Bentuk pelayanannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan 2. Pelayanan 3. Pelayanan 4. Pelayanan <p>c. Perusahaan mempunyai pelayanan. Bentuknya pelayanannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan 2. Pelayanan 3. Pelayanan

PERTANYAAN	JAWABAN
	4. Pelayanan
	5. Pelayanan
	d. Tidak ada yang mempunyai pelayanan
Nama Ibukota Kabupaten/Kota
Tanggal pengisian (Tgl/bulan/Tahun)
Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota
Tanda tangan dan stempel

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE